



● TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 ●

info indonesia

MINGGU | MARET 2024

HARGA, @ Rp 20.000,-



Election
2024

PEMILU BRUTAL 2024

✓ **CURANG
PILPRES
CURANG
PILEG**

● POLITIK BANSOS SATU
PUTARAN BERIMBAS
BERAS MAHAL

● BANYAK
"GIVE AWAY" JOKOWI
UNTUK PRABOWO

● KADER POTENSIAL
NASDEM CALON
WALI KOTA MEDAN

● REBUTAN KURSI
JAKARTA SATU

● JANGAN TERJADI
PENCACATAN
PEMILU

● TOLAK MAKAN
SIANG GRATIS
PAKAI DANA BOS





“Secara logika politik, kalo data sudah masuk di atas 60 persen naik turunnya perolehan suara partai atau caleg biasanya datar, tak ada lonjakan-lonjakan yang signifikan. Ini yang perlu diinvestigasi untuk mengetahui datanya secara akurat agar semua transparan”

Adi Prayitno



Ledakan

Perhelatan Pemilu 2024 tidak lepas dari isu perbedaan data suara sejumlah partai politik. Netizen atau warganet dengan sigap mengawal isu ini demi menjaga integritas demokrasi bangsa.

Transparansi data dari penyelenggara KPU menjadi tumpuan masyarakat melakukan pengawalan kolektif ini.

Tiga minggu setelah hari pemungutan suara, masyarakat dihebohkan dengan adanya isu perbedaan data suara beberapa partai politik. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadi sorotan karena diduga mendapatkan suara lebih besar daripada yang seharusnya.

Dugaan pengelembungan suara PSI memunculkan spekulasi adanya potensi kecurangan saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan.

Kekeliruan input data Sirekap ini harus ditelusuri oleh KPU apakah semata faktor kesalahan sistem atau ada indikasi kesengajaan menggiring suara ke partai tertentu.

Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi, menyebut kenaikan suara PSI dengan sebutan “ledakan”. Sebab fenomena ini berbeda dengan naik dan turunnya suara partai lain di Pemilu 2024 yang terlihat smooth.

“PKB naik turun suaranya smooth sejak awal. Demikian juga dengan partai-partai lain. Sementara perolehan suara PSI ‘meledak’ hanya dalam beberapa hari terakhir saja. Biasanya kalau data masuk di Sirekap sudah besar dan proporsional, suara partai-partai tidak akan sediamis ini,” tulis Burhanuddin di media sosial X miliknya.

Burhanuddin juga berkata di lini masa akun X pribadinya bahwa akan melakukan pengecekan anomali tersebut. Ia bakal membandingkannya dengan formulir C Hasil di TPS yang menjadi sampel quick count lembaga survei.

Tabloid Info Indonesia edisi I Maret 2024 akan menyajikan sejumlah isu nasional pasca pesta demokrasi yang digelar 14 Februari lalu.

Selain soal dugaan pengelembungan suara PSI agar mencapai Presidential Threshold 4 persen, juga kontroversi pemberian pangkat Jenderal Kehormatan dari Presiden Joko Widodo kepada Prabowo Subianto. Hal ini memunculkan kecurigaan publik dengan banyaknya give away untuk Menteri Pertahanan itu dari Jokowi.

Tak hanya itu, kami juga sajikan informasi terkait Pilkada 2024 yang direncanakan digelar pada 27 November mendatang. Sebelumnya muncul wacana perubahan UU Pilkada untuk memajukan jadwalnya menjadi pada September 2024.

Beragam kontroversi itu memunculkan dugaan bahwa Pemilu 2024 menjadi pemilu paling brutal yang penuh dengan kecurangan, baik di Pilpres maupun Pileg. Selamat membaca!!!●



INFOINDONESIA.ID adalah media massa cetak di bawah payung PT. DUA SATU PRO
Sertifikat Dewan Pers
Nomor 969/DP-Verifikasi/K/III/2022

PENDIRI/ DIREKTUR : Usman Rizal

PEMIMPIN PERUSAHAAN: Adam Aulia Manzal Khan **PEMIMPIN REDAKSI:** Rusdiyono **WAKIL PIMPINAN REDAKSI:** Rahmad Romli

REDAKTUR PELAKSANA: Irmayani **REDAKTUR:** Rio Taufiq Adam, Fonda Lapod, Rusdy Setiawan Putra, Irmayani, Rusdiyono, Nina

Erlina **REPORTER:** Nefri, Indra Hadi, Pahmi Ramadhan, Moehamad Moeslim, Sadam M, Hardi Aar, Reno, Aldi Rinaldi, M. Iqbal, Andyanto,

M. Yadhi, Muhammad Fiqri, Muhammad Khaidir **EDITOR & GRAFIS:** Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali

KEUANGAN : Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI:** Nur Aisah **PENGEMBANGAN BISNIS:** M. Iqbal, Zul Fahmi **ADMINISTRASI:**

Ega Tri Gustina **DISTRIBUSI:** Abdul Mughtar

HARGA IKLAN: 1 Halaman ukuran 290 mm x 420 mm Rp.25.000.000,-include PPN 11 %.

1/2 Halaman ukuran 145 mm x 210 mm Rp. 12.500.000,-

BANK ACCOUNT: *A/N : PT. DUA SATU PRO, BCA: No.Rek: 5530682121 KCP Otista Jakarta Timur **ALAMAT REDAKSI/IKLAN/**

PEMASARAN: Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750 **TELP** 021-

791 96781 **FAX** 021-791 96786 **PALEMBANG** Jalan Puncak Sekuning Lorong Sahabat No 2 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I

Palembang 30126 **TELP :** 0711-7442344



“Apa yang dilakukan Jokowi terhadap Prabowo, dapat dimaknai sebagai kepatuhan Prabowo dihargai dengan hadiah sekaligus rasa Hormat Jokowi sebagai Presiden”

Efriza

BANYAK “GIVE AWAY” JOKOWI UNTUK PRABOWO

Kemenangan Prabowo Subianto di Pilpres 2024 tak lepas dari campur tangan Presiden Joko Widodo. Beberapa kebijakan yang dikeluarkan Jokowi nampak memperlihatkan dukungannya untuk Ketua Umum Partai Gerindra itu, mulai dari pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, dukungan melalui anggaran dan aparatur negara, pemberian pangkat jenderal kehormatan, hingga masuknya program makan siang gratis di RAPBN 2025.

Apa yang dilakukan Jokowi seakan memperlihatkan banyak yang diberikan atau “give away” kepada Menteri Pertahanan itu, baik sebelum maupun setelah Pilpres 2024.

Pada 26 Januari 2024, pada rapat kabinet di Istana Kepresidenan Jakarta, dalam pembahasan RAPBN 2025, Presiden Jokowi dikabarkan juga membahas terkait program makan siang gratis yang digagas Prabowo-Gibran. Bahkan telah masuk dalam pembahasan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP).

“RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil pilpres 2024. Sambil menunggu perhitungan resmi KPU. Karena yang akan berjalan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” ujar Presiden Jokowi.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, juga mengatakan hal yang sama. Dia memastikan program makan siang gratis akan berjalan tahun depan. Pemerintah telah menghitung alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk mewujudkan program prioritas Prabowo-Gibran ini.

Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, ikut mengungkap kalau sidang kabinet turut membahas men-

genai program unggulan dari Prabowo-Gibran. Bahlil yakin anggaran pemerintah akan cukup untuk melaksanakan program tersebut.

“Program-program presiden terpilih, Pak Prabowo-Mas Gibran itu sudah akan diakomodir. Pada saat 2025 itu langsung jalan,” katanya.

Sementara, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyebut makan siang gratis masih sebatas program capres dan akan menunggu keputusan KPU mengenai pemenang Pilpres 2024.

Menurut Sri Mulyani, secara detail soal program makan siang gratis masih harus melihat secara detail masih harus melihat dalam pembahasan pagu indikatif. Dia menambahkan, pembahasan mengenai program-program presiden berikutnya tentu akan digelar setelah KPU mengeluarkan keputusan resmi.

Presiden Jokowi juga memberikan tanda kehormatan berupa kenaikan pangkat jenderal secara istimewa kepada Prabowo Subianto, sehingga kini mantan Danjen Kopassus itu mendapatkan pangkat jenderal bintang empat. Pemberian tanda kehormatan pangkat jenderal bintang empat ini sesuai dengan UU 20/2009 tentang Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan. Kenaikan pangkat itu juga berdasarkan Keppres 13/TNI/Tahun 2024 tanggal 21 Februari 2024.

Jokowi menyampaikan, penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan kepada Prabowo yang telah secara penuh berbakti kepada rakyat, bangsa, dan negara.

“Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus penegasan untuk berbakti sepenuhnya kepada

da rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara,” kata Jokowi dalam Rapim TNI Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu, 28 Februari 2024.

Langgar Aturan

SETARA Institute memandang, secara yuridis, kenaikan pangkat kehormatan itu tidak sah dan ilegal. UU 34/2024 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak mengenal bintang kehormatan sebagai pangkat kemiliteran.

“Bintang sebagai pangkat militer untuk Perwira Tinggi hanya berlaku untuk TNI aktif, bukan purnawirawan atau pensiunan,” kata Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan.

Jika merujuk pada UU 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, maka bintang yang dimaksud adalah Bintang sebagai Tanda Kehormatan, yang menurut Pasal 7 Ayat (3), dalam bentuk Bintang Gerilya, Bintang Sakti, Bintang Dharma, Bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Pakçi, Bintang Jalasena, dan Bintang Swa Bhuwana Paksa.

“Bukan bintang sebagai pangkat kemiliteran perwira tinggi bagi purnawirawan militer,” ujar Halil.

Secara lebih spesifik, jika merujuk kepada Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 18 Tahun 2012, pemberian kenaikan

pangkat ini juga merupakan tanda tanya besar. Dalam ketentuan umum peraturan ini, disebutkan bahwa Kenaikan

Pangkat Istimewa diberikan kepada PNS dengan prestasi luar biasa baik.

Sedangkan, Kenaikan Pangkat Luar Biasa (KPLB) diberikan kepada prajurit yang mengemban penugasan khusus dengan pertahanan jiwa dan raga secara langsung dan berjasa dalam panggilan tugasnya.

“Dalam dua kategori ini, tentu Prabowo tidak masuk kualifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan tersebut,” kata Halil.

Selain itu, bintang kehormatan sebagai pangkat militer perwira tinggi itu bermasalah. Sebagaimana diketahui, Prabowo pensiun dari dinas kemiliteran karena diberhentikan melalui KEP/03/VIII/1998/DKP dan Keppres Nomor 62 Tahun 1998, bukan karena memasuki usia pensiun. Dengan demikian, keabsahan pemberian bintang kehormatan itu problematik.

“Sebuah kontradiksi jika sosok yang diberhentikan dari dinas kemiliteran kemudian dianugerahi gelar kehormatan kemiliteran,” tegas Halil.

Analisis politik Citra Institute, Efriza, mengatakan, Presiden Jokowi telah memberikan banyak give away kepada Prabowo Subianto.

“Jokowi banyak memberikan hadiah untuk Prabowo pasca Pemilu,” katanya.

Efriza mengatakan, Presiden Jokowi sepertinya sudah menganggap Prabowo sebagai orang dekatnya. Apalagi, anaknya, Gibran Rakabuming Raka menjadi pendampingnya di Pilpres.

“Apa yang dilakukan Jokowi terhadap Prabowo, dapat dimaknai sebagai kepatuhan Prabowo dihargai dengan hadiah sekaligus rasa Hormat Jokowi sebagai Presiden,” ujarnya.

Give away yang diberikan Presiden Jokowi kepada Prabowo yang pertama adalah memberikan penghargaan berupa pemberian pangkat jenderal bintang 4.

“Ini menunjukkan Jokowi sedang memulihkan nama baik Prabowo. Langkah Jokowi ini didasari oleh fakta dedikasi dan hasil kinerja Prabowo terhadap pertahanan dan keamanan untuk negeri ini,” ucapnya.

Kedua, Jokowi sudah membahas serta membuat simulasi untuk mewujudkan program makan siang dan susu gratis dalam RAPBN 2025 yang merupakan program dari Prabowo.

“Ini semakin menunjukkan Prabowo adalah seorang menteri dan capres yang patuh terhadap Jokowi. Kepatuhan ini tampak setelah Jokowi menunjukkan dirinya mengendorse Prabowo kali pertama, lalu juga dilanjutkan oleh nama koalisinya yang identik, serta Prabowo yang patuh memilih melanjutkan program Jokowi,” tandasnya. ●RDO





GARA-GARA HAK ANGKET GANJAR JADI PESAKITAN

Indonesia Police Watch (IPW) melaporkan dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh calon presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ganjar diduga memperoleh aliran dana dari gratifikasi dan suap penerimaan cash back atau uang kembali yang dilakukan Direktur Utama Bank Jateng periode 2014-2023, Supriyatno.

Pelaporan ini dinilai sebagai bentuk pembunuhan karakter terhadap Ganjar yang sedang menggulirkan usulan hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilihan Presiden 2024.

Sebelumnya, IPW melaporkan Ganjar ke KPK bersama satu orang lain, yakni Direktur Utama BPD Jateng periode 2014-2023 berinisial S ke KPK.

Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, mengatakan, laporan itu atas dugaan penerimaan cashback dari perusahaan asuransi. Nilai dugaan gratifikasi atau suap itu mencapai lebih dari Rp100 miliar.

“IPW melaporkan dugaan tindak pidana korupsi gratifikasi dan atau suap penerimaan cashback beberapa perusahaan asuransi kepada Dirut Bank Jateng (inisial S) dan juga pemegang saham kendali Bank Jateng Ganjar Pranowo (GP) diperkirakan terjadi sejak 2014 sampai dengan 2023,” kata Sugeng.

Sugeng menjelaskan, perusahaan asuransi itu memberikan pertanggungan jaminan kredit kepada kreditur Bank Jateng yang dipahami sebagai cashback.

Adapun Bank Jateng mengendalikan cashback dari perusahaan asuransi sebesar 16 persen dari nilai premi. Nilai 16 persen tersebut kemudian diduga dialokasikan ke tiga pihak.

“Lima persen untuk operasional Bank Jateng, baik pusat maupun daerah, 5,5 persen untuk pe-

megang saham Bank Jateng yang terdiri atas pemerintah daerah atau kepala-kepala daerah,” ucap Sugeng.

“Yang 5,5 persen diberikan kepada pemegang saham pengendali Bank Jateng yang diduga adalah Kepala Daerah Jawa Tengah dengan inisial GP,” sambungnya.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Chico Hakim, menyebut pelaporan terhadap Ganjar ke KPK merupakan sebuah gerakan politik.

“Kami melihat ini suatu gerakan politik, ya bukan suatu murni gerakan yang menegakkan keadilan,” kata Chico, Selasa, 5 Maret 2024.

Chico menduga gerakan politik tersebut menandakan adanya ketidaksuksaan dari pihak-pihak tertentu kepada sosok Ganjar. Sebab, Ganjar merupakan sosok yang pertama kali menggulirkan rencana hak angket di DPR untuk menyelidiki dugaan kecurangan Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024.

“Kita melihat, kita tahu sekarang d e n g a n

adanya masa-masa pemilu yang belum berakhir, dan terkait banyak hal yang terjadi, seperti disinyalir banyaknya pelanggaran pemilu, dalam kampanye kecurangan-kecurangan,” ucap Chico.

“Dan penilaian dari kami ini, dugaan kami ini adalah adanya ketidaksuksaan dari berbagai pihak dengan kemudian mendorong untuk melakukan gerakan politik dengan melaporkan Bank Jateng dan kemudian berimbasnya suatu magnetitas dengan Pak Ganjar,” imbuhnya.

Chico menambahkan, laporan yang dilaungkan oleh IPW itu terlihat sangat dipaksakan. Chico mengaku sudah melihat dan memeriksa situs resmi IPW sebagai pihak pelapor Ganjar. Hasilnya, tidak ada fungsi IPW untuk melaporkan hal-hal yang berhubungan dengan Polri ke KPK.

“Kalau kita lihat dari laman resmi IPW, fungsi-fungsinya dia berberkan di sana. Kami tidak melihat ada fungsi melaporkan sesuatu yang tidak berhubungan dengan Polri ke KPK. Dan ini terlihat dalam tanda kutip sangat kebetulan ke-

tika Pak Ganjar orang pertama yang melontarkan untuk menggulirkan hak angket, kemudian terjadilah laporan seperti ini,” ujar Chiko.

Direktur Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Ronny Talapessy, juga menyatakan kecurigaan adanya politisasi hukum atas Ganjar menguat, mengingat pernyataan Juru Bicara TKN Prabowo-Gibran, Fahri Hamzah, beberapa waktu lalu, bahwa bakal ada calon yang menjadi tersangka pasca Pilpres 2024 setelah kalah satu putaran.

Ronny mengaku masih ingat betul pernyataan yang disampaikan Fahri Hamzah lewat akun X pada awal Januari lalu itu.

“Kami TPN masih ingat betul pernyataan Fahri Hamzah dalam salah satu video bahwa akan ada salah satu capres jadi tersangka. Jadi, kami sungguh berharap tidak ada politisasi hukum pasca-pemilu ini karena dampaknya sangat besar,” kata Ronny, Selasa, 5 Maret 2024.

Menurut Ronny, ucapan Fahri Hamzah itu justru bisa menimbulkan dampak bagi stabilitas politik setelah Pemilu 2024. Karenanya dia berharap stabilitas politik tetap terjaga.

“Ini yang saya kira perlu kami ingatkan agar jangan bermain-main politisasi hukum,” ungkapnya.

Politikus PDIP ini meyakini, Ganjar bersih dari kasus hukum karena telah melewati serangkaian proses yang memenuhi syarat sebagai calon presiden. Kendati begitu, TPN disebut bakal berdiskusi terlebih dulu dengan Ganjar soal laporan itu sebelum mengambil tindakan atau upaya hukum selanjutnya.

“Sebenarnya ini bukan ranah TPN karena laporannya diduga pada waktu Mas Ganjar Gubernur Jawa Tengah. Tentu saja TPN tidak tahu apa yang terjadi pada masa itu. Dan tugas TPN tidak mengurus hal-hal di luar masalah pemilu dan pilpres. Tetapi bagaimana pun karena menyangkut Mas Ganjar Pranowo, kami akan mempelajarinya terlebih dahulu dan akan berdiskusi dengan Mas Ganjar,” tutur dia.

Sementara itu, Ganjar Pranowo membantah tuduhan atas dugaan penerimaan gratifikasi berupa cashback dari perusahaan asuransi.

“Saya tidak pernah menerima pemberian atau gratifikasi dari yang dia tuduhkan,” kata Ganjar di Jakarta, Selasa, 5 Maret 2024.

Terpisah, Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, membenarkan adanya laporan dari IPW tersebut. Pihaknya akan menindaklanjuti dan melakukan verifikasi lanjutan.

“Setelah kami cek, betul ada laporan masyarakat dimaksud. Kami segera tindak lanjuti dengan verifikasi terlebih dahulu oleh bagian pengaduan masyarakat KPK,” ucap Ali. RDO





“Jangan sampai nanti membuat cacat pemilu. Nila setitik rusak susu sebelanga. Begitu terjadi peristiwa seperti ini, maka akan merusak semua”

Anies Baswedan

JANGAN TERJADI PENCACATAN PEMILU

Calon presiden nomor urut 01, Anies Baswedan, ikut berkomentar soal suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam pemilu 2024 yang sempat mengalami lonjakan secara tiba-tiba. Meski tidak secara langsung menuduh ada dugaan kecurangan dalam kasus itu, Anies menekankan agar tidak sampai terjadi “pencacatan” pemilu.

“Jangan sampai nanti membuat cacat pemilu. Nila setitik rusak susu sebelanga. Begitu terjadi peristiwa seperti ini, maka akan merusak semua,” kata Anies, Senin, 4 Maret 2024.

Anies menuturkan, jika terjadi hal yang menyebabkan pemilu terkesan cacat, nantinya akan merusak kepercayaan rakyat terhadap berjalannya proses pemilu. Ia pun menyebut harus ada pertanggungjawaban jika memang terjadi kecurangan dalam kasus PSI.

“Pemerintah harus ikut bertanggung jawab, walaupun ketuanya adalah anak presiden, bukan berarti segala hal bisa dilakukan terhadap partai yang dipimpin oleh anak presiden. Malah lebih ketat lagi pengawasannya supaya tidak ada jajaran di bawah yang kemudian melakukan kegiatan walaupun tanpa diperintah, tapi inisiatif bisa terjadi,” ujarnya.

Anies juga menekankan akan seluruh elemen masyarakat bisa bersama-sama melakukan pengawasan yang lebih intensif. Dengan adanya pengawasan dari berbagai elemen masyarakat, transparansi jadi lebih berjalan.

“Karena kejahatan itu takut transparansi, tidak ada kejahatan yang berani terhadap transparansi. Terus pantau agar jujur kalau memang suaranya harus dilindungi, kalau memang tidak ada suaranya jangan diada-adakan,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Sikap yang tidak transparan dalam pemilu 2024 dianggap merupakan praktek yang memalukan. Anies menegaskan agar pemilu 2024 bisa berjalan tanpa meninggalkan kesan memalukan.

“Pemilu kita harus jadi pemilu yang membanggakan, jangan jadi pemilu yang memalukan. Kenapa memalukan? Memalukan itu ada yang disembunyikan. Kita mendengar peristiwa itu, rakyat juga memantau, dan mengundang kegelisahan. Kalau ini bisa terjadi berarti yang lain-lain bagaimana? Mungkin ada kejadian serupa yang tidak diketahui,” tuturnya.

Sebelumnya diketahui, raihan suara PSI tiba-tiba meledak. Dalam enam hari, lonjakan hampir 400 ribu suara membuat total suara PSI melaju mendekati ambang batas parlemen (parliamentary threshold) 4 persen.

Ledakan suara itu tampak dalam hasil penghitungan surat suara atau real count sementara yang dilakukan KPU menggunakan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Hasil real count terhadap data dari 530.776 TPS per 26 Februari 2024 pukul 06.00 WIB, menunjukkan PSI masih mendapatkan 2.001.493 suara atau 2,68 persen. Lantas, hasil real count terhadap 541.260 TPS per 2 Maret 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan bahwa PSI sudah mendulang 2.399.469 suara atau 3,13 persen.

Dari data tersebut tampak bahwa PSI mendapatkan tambahan 397.976 suara dalam enam hari. Secara persentase, raihan suara PSI naik 0,45 persen. PSI satu-satunya partai yang mengalami lonjakan suara sebesar itu. Adapun data masuk untuk real count bertambah dari 10.484 TPS dalam enam hari terakhir.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menyebut, lonjakan drastis raihan suara partainya di laman publikasi Sirekap KPU merupakan hal yang wajar. Dia meminta semua pihak untuk tidak

tenden-

sus dan menggiring opini negatif terkait penambahan total raihan suara PSI dalam Pileg 2024.

“Penambahan, termasuk pengurangan suara selama proses rekapitulasi adalah hal wajar. Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace.

Grace menjelaskan, lonjakan suara itu wajar karena memang masih banyak data TPS yang belum masuk atau digunakan KPU dalam proses real count via Sirekap.

“Hingga saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat,” kata Grace.

Anies juga mengomentari langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo yang sudah membahas program makan siang gratis yang digagas Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Dia mempertanyakan dasar hukum pemerintah menguji coba program makan siang gratis. Padahal, proses hasil perhitungan suara oleh KPU untuk Pilpres 2024 belum seluruhnya rampung.

“Pemerintah mulai membuka diri kepada pemenang setelah KPU menetapkan. Sebelum KPU menetapkan, pertanyaannya dasar hukumnya apa? ketika pemerintah merapikan rencana sebuah paslon, dasar hukumnya apa?” kata Anies di Kampung Akuarium, Jakarta Utara, Minggu, 3 Maret 2024.

Anies menilai, sikap pemerintah yang mulai melakukan

pembahasan untuk program pemerintah selanjutnya merupakan bentuk keterbukaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun demikian, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menekankan perlunya dasar hukum atas segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut.

“Negara itu kan bergerak menggunakan aturan hukum bukan? ketika sudah ada surat keputusan KPU nomor xyz tanggal sekian, tahun sekian, ditetapkan pasangan abcd menjadi pemenang itu menjadi dasar untuk pemerintah mengakomodasi. Tapi, kalo belum ada keputusan lalu apa dasarnya?” ujar Anies.

“Kalau itu (simulasi makan siang gratis) dikerjakan oleh pasangan terserah, tapi enggak boleh oleh negara. Bahkan, negara merapikan (membahas) pun dasarnya apa? Enggak ada dasar hukumnya,” katanya lagi.

Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Tom Lembong, juga ikut memberikan komentar terkait langkah pemerintah yang membahas program makan siang dan susu gratis Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, Tom Lembong enggan berkomentar terkait etis atau tidaknya pemerintah yang membahas program salah satu paslon dalam sidang kabinet ketika perhitungan suara KPU masih berlangsung dan belum menetapkan pasangan terpilih.

Tom mengungkapkan, sebaiknya pembahasan kebijakan peningkatan gizi masyarakat, seperti program makan siang gratis, dilakukan melalui diskusi yang lebih teknokratis. Bahkan, menurutnya, pembahasan kebijakan itu harus berlandaskan data dan fakta.

“Kebijakan seperti nutrisi itu kan sebaiknya diproses melalui sebuah diskusi yang teknokratis, berlandaskan hitungan yang transparan dan data, fakta, realita. Semakin teknokratis, semakin profesional, semakin transparan, semakin baik,” kata Tom Lembong, Minggu, 3 Maret 2024.

Di sisi lain, Tom juga membandingkan program makan siang dan susu gratis milik Prabowo-Gibran dengan program peningkatan nutrisi milik Anies-Muhaimin. Menurutnya program ini lebih cocok untuk diterapkan di Indonesia karena bisa memanfaatkan sumber daya laut yang berlimpah untuk diolah menjadi sumber protein.

“Misalnya, gagasan Anies-Muhaimin untuk memanfaatkan sumber daya perikanan kita yang berlimpah-limpah, yang diolah menjadi sumber protein, yang lebih cocok buat masyarakat kita, mengingat kita negara kepulauan, negara kelautan,” sebutnya.

• RDO



“Jakarta dianggap sebagai episentrum politik, di mana semua tokoh yang dianggap politisi nasional ditempatkan di sana sebagai ukuran kekuatan suatu partai”

Adi Prayitno



REBUTAN KURSI JAKARTA SATU

Sejumlah nama mulai muncul jelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024, bahkan mereka dianggap sosok yang memiliki potensi besar bertarung untuk Jakarta 1.

Nama-nama yang mulai mencuat adalah tokoh-tokoh politik, pemimpin daerah, mantan pejabat publik, politisi hingga kader partai politik.

Nama tersebut antara lain Anies Rasyid Baswedan, Ridwan Kamil, Ahmad Zaki Iskandar, Komjen (Purn) Dharma Pongrekun, Tri Rismaharini, Riza Patria, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Ahmad Sahroni, Kaesang Pangarep dan Heru Budi Hartono disebut-sebut bakal rebutan kursi DKI Jakarta 1.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menganggap wajar jika Anies Baswedan dipertimbangkan untuk kembali maju dalam Pilgub DKI Jakarta jika ia kalah dalam Pilpres 2024.

Bagi Adi, DKI Jakarta merupakan pusat politik yang menjadi patokan kekuatan partai politik.

“Jakarta dianggap sebagai episentrum

Kamil, Ahmad Sahroni, dan bahkan Anies Baswedan disebut-sebut sebagai potensi kandidat yang mungkin akan maju.

Adi juga menyebut tentang munculnya flyer yang mengusung pasangan rekonsiliasi Anies dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2024.

“Flyer-flyer tentang pasangan calon rekonsiliatif Pilkada 2024, seperti Pak Anies Baswedan dan Ahok, sudah muncul di mana-mana. Ini menjadi sorotan. Bahkan Pak Ridwan Kamil diproyeksikan akan berpasangan dengan Pak Heru Budi Hartono yang saat ini menjabat pj (Gubernur DKI Jakarta). Ini adalah suara-suara yang sudah terdengar,” ungkapnya.

Namun demikian, Adi menganggap masih terlalu dini untuk membahas kandidat yang akan bertarung dalam Pilgub DKI Jakarta.

“Saat ini partai-partai sedang mengincar wilayah-wilayah kunci yang akan menjadi prioritas dalam pertarungan,” tambah Adi.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih dalam proses pertimbangan apakah akan mengusung Anies Baswedan sebagai Cagub DKI Jakarta pada Pilkada 2024 atau tidak.

“Kami belum bisa memberikan jawaban pasti. Kami tidak ingin berspekulasi tentang hal ini,” kata Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKS DKI Jakarta Abdul Aziz.

Aziz mengatakan hal tersebut sebagai tanggapan terhadap banyaknya perbincangan di media sosial X mengenai kemungkinan Anies maju kembali sebagai Cagub DKI Jakarta pada Pilkada November 2024 mendatang.

Pada Pilgub DKI 2017,

Anies pernah diusung oleh PKS dan Gerindra. Saat itu, ia berpasangan dengan Sandiaga Uno.

Aziz menolak untuk berspekulasi mengenai langkah partainya dalam Pilkada berikutnya. Apakah akan mengusung Anies seperti pada 2017 atau tidak.

“Kami berpendapat bahwa Pak Anies memiliki potensi untuk mencapai putaran kedua (pilpres),” katanya.

Menurut Aziz, PKS belum memutuskan secara resmi mengenai Cagub DKI Jakarta. Partai masih fokus pada pengawalan suara Pilpres dan Pileg 2024.

Dia menyatakan bahwa semua anggota legislatif dari PKS memiliki kesempatan yang sama untuk diusung karena memiliki pengalaman dalam tata kelola pemerintahan di Jakarta.

“Semua anggota dewan PKS memiliki peluang. Mereka berpengalaman dan mengerti tata kelola pemerintahan di Jakarta dengan baik. Kami akan mencari yang terbaik dari mereka untuk diusung,” ujarnya.

Aziz menyatakan bahwa PKS akan membahas pencalonan untuk Pilkada setelah Pilpres 2024 selesai.

PKS memiliki mekanisme khusus dalam proses kandidasi Pilkada. Di Jakarta, DPW PKS Jakarta akan mengusulkan calon kepada DPP PKS untuk dipertimbangkan.

“Kami memiliki sistem dari bawah ke atas, dengan usulan dari DPW PKS DKI ke-

putusan akan diambil oleh DPP. Kami juga akan melakukan riset dan

survei untuk mengetahui siapa yang paling cocok, serta apa yang diinginkan masyarakat Jakarta,” jelasnya.

Ditambahkan pengamat politik Usep S Ahyar mengungkap kriteria yang diperlukan untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta selanjutnya.

Menurutnya, calon Gubernur harus memiliki pemahaman yang mendalam mengenai berbagai persoalan yang ada di Jakarta serta memiliki konsep solusi yang jelas.

“Tentu saja, yang pertama, dia harus paham betul persoalan Jakarta, dan memiliki konsep untuk menyelesaikannya. Memiliki konsep terkait penanganan banjir, kemacetan, kepadatan penduduk, ekonomi, dan hal-hal lainnya,” ujarnya.

Selanjutnya, pengalaman dalam menangani masalah perkotaan juga menjadi hal yang penting untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Ahyar mencontohkan sosok Ridwan Kamil sebagai salah satu yang cocok untuk posisi tersebut.

“Yang kedua, tentu harus memiliki pengalaman dalam menyelesaikan berbagai masalah di perkotaan. Contohnya adalah Ridwan Kamil yang memiliki pengalaman yang cukup di kota besar, Bandung, dan juga memimpin provinsi yang memiliki jumlah penduduk yang besar,” tambahnya.

Tidak hanya itu, calon Gubernur DKI Jakarta juga perlu merancang konsep transisi dari status Jakarta sebagai Ibu Kota menjadi bukan lagi Ibu Kota Negara.

“Bagaimana Jakarta akan bertransformasi dari Ibu Kota menjadi bukan Ibu Kota? Ini tentu merupakan tantangan tersendiri, termasuk dalam menangani berbagai masalah yang terkait dengan status Jakarta sebagai Ibu Kota yang akan berubah,” paparnya.

Ahyar juga menekankan bahwa dari segi sifat dan karakter, pemimpin Jakarta perlu memiliki keberanian serta kepemimpinan yang kuat. Yang paling penting, menurutnya, adalah bagaimana sosok Gubernur DKI Jakarta nantinya memiliki visi yang jelas terhadap pengelolaan Jakarta ke depan.

“Dari segi sifat kepemimpinan, dia perlu memiliki sikap tegas dalam memimpin, dan yang terpenting adalah memiliki konsep yang jelas tentang bagaimana Jakarta akan dikelola.

Hal ini sangat penting, agar Jakarta dapat menjadi kota besar yang beradab,” pungkasnya. •IRY





“Siapa pun yang ingin menjadi Gubernur harus terlebih dahulu maju sebagai calon anggota legislatif”

Airlangga Hartanto

INFO PILKADA

Minggu I • Maret 2024

7

KUNCI CAGUB SUMUT DI TANGAN MUSA RAJEKSHAH

Peningkatan signifikan perolehan suara Partai Golkar pada Pemilu 2024 membuka peluang besar bagi Ketua DPD Golkar Sumatera Utara (Sumut), Musa Rajekshah untuk mengikuti pertarungan Pemilihan Kepala Daerah.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto meyakinkan bahwasanya Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck telah memegang kunci calon gubernur Sumatera Utara (cagubsu).

Ini setelah Ketua DPD Partai Golkar Sumut tersebut sukses membawa ‘pohon beringin’ itu menjadi pemenang pada Pemilu 2024 di Sumut.

Menurut orang nomor satu di Partai Golkar tersebut, jumlah kursi parlemen dari Daerah Pemilihan Sumut diprediksi naik berdasarkan penghitungan, sehingga sangat wajar kalau Musa Rajekshah, menjadi Calon Gubernur Sumut.

“Ini Sumatera Utara, jadi kursi Sumatera Utara semua naik dobel,” ujarnya.

Kenaikan perolehan kursi itu, kata Airlangga, menjadi kunci bagi partai berlambang pohon beringin untuk bisa berlari kencang pada Pemilu 2024.

“Siapa pun yang ingin menjadi Gubernur harus terlebih dahulu maju sebagai calon anggota legislatif. Kalau suaranya tinggi, baru kita kasih. Kalau belum ya terpaksa on the way dulu, dalam perjalanan,” sebutnya.

Dilansir melalui situs resmi KPU, Partai berwarna kuning tersebut berhasil meraih suara tertinggi sebanyak 392,084 (20.34%).

Airlangga Hartanto telah mengu-

mumkan bahwa ia telah mengeluarkan surat tugas kepada Musa Rajekshah, untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilkada Sumut Tahun 2024.

“Pemberian surat penugasan sudah dilakukan,” ujar Airlangga dalam sambutannya pada acara Peluncuran dan Bedah Buku: Jalan Tengah Golongan Karya di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, pada Senin, 26 Februari 2024.

Musa Rajekshah merupakan salah satu kandidat yang mendapatkan perolehan suara terbanyak, dengan jumlah lebih dari 30 ribu suara.

Musa adalah mantan Wakil Gubernur Sumut yang pernah mendampingi Edy Rahmayadi pada periode 2018 hingga 2023.

Sekretaris Golkar Sumut, Ilhamsyah

menyatakan Musa Rajekshah telah memberikan kejayaan bagi Golkar, terbukti dengan perolehan suara tertinggi pada Pemilu 2024 yang menempatkan Golkar di posisi pertama.

“Ketum DPD Golkar Sumut, Musa Rajekshah, memang sudah saatnya memimpin Sumatera Utara, kinerjanya membawa Golkar menjadi partai dengan posisi pertama,” ujar Ilhamsyah.

Ilhamsyah menjelaskan sebelumnya DPP Partai Golkar telah mengeluarkan surat tugas dengan nomor: Sund- 308 / GOLKAR/XI/2023. Surat tersebut ditandatangani oleh Waketum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris DPP Golkar Lodewijk F Paulus.

“Sebelumnya, Ketua DPD sudah mendapatkan mandat untuk maju di Pilkada. Peluangnya sangat besar dengan kinerja yang baik,” tambahnya.

Ia juga mengatakan, Ijeck ini juga merupakan Wakil Gubernur Sumut periode 2018-2023.

“Dari segi pengalaman Ijeck kan juga mantan Wakil Gubernur Periode 2018-2023, itu menjadi modal penting pak Ijeck,” jelasnya.

Diketahui Pilkada serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota di seluruh Indonesia dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024, sesuai hasil kesepakatan Komisi II DPR RI bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu.

Pemberian mandat dari Airlangga Hartanto kepada Musa Rajekshah, untuk mencalonkan diri dalam Pilgubsu 2024. Langkah ini menandai babak baru dalam dukungan partai berlambang pohon beringin terkait agenda politik di Sumut.

Sebelumnya, penunjukan sebagai calon gubernur dalam Pilgubsu 2024 telah diberikan kepada menantu Presiden Joko Widodo, yang juga Wali Kota Medan, Bobby Afif Nasution. Perubahan pendekatan dari Golkar ini.

Menurut pengamat sosial dan politik Dr. Bakhrol Khair Amal, adalah hal yang lumrah.

“Istilah ‘anak Medan’ hanyalah cek ombak semata,” ungkapnya.

Menurut Bakhrol, cek ombak ini memiliki alasan yang kuat. Pasalnya, upaya saling mendukung itu dilakukan sebelum tahapan-tahapan penting seperti pilkada dan pilgub.

“Kita semua tahu bahwa dalam surat-surat dari partai politik, selalu ada klausul yang mengatakan bahwa itu dapat diperbaharui kapan saja. Jadi, cek ombak ini adalah hal yang biasa,” jelasnya.

Sebagai seorang akademisi dari Universitas Negeri Medan (Unimed), Bakhrol menjelaskan bahwa pernyataan dari Airlangga tersebut sebaiknya tidak dianggap terlalu serius. Sebab, pernyataan tersebut tidak bisa dijadikan legitimasi yang pasti untuk maju sebagai calon di Pilgubsu 2024.

“Ini dapat berubah-ubah sesuai dengan konsensus yang terbentuk. Besok-besok Golkar mungkin saja memutuskan untuk tidak mengusung Bobby atau pun Ijeck. Semua bisa terjadi,” tandasnya.

Nama Ijeck itu sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Sumut, tak hanya berkecimpung di dunia politik, Ijeck juga menjabat beberapa organisasi dengan rentang waktu yang cukup lama.

Sebelum terjun ke dunia politik, Ijeck pernah menduduki posisi penting di beberapa perusahaan ternama, mulai dari PT Anugerah Sawindo, PT Kembang Sepatu Alam Abadi, dan PT Sumatra Motor Indonesia.

Meski Ijeck tidak pernah sekalipun terlibat langsung di dalam berbagai aktivitas politik, namun ia tetap bersikeras untuk bisa terjun di dunia politik.

Sampai pada tahun 2018, namanya terpampang menjadi calon Wagub Sumut mendampingi Edy Rahmayadi.

Tak disangka, ia bersama Edy Rahmayadi telah memikat hati para warga Sumut itu berhasil memenangkan suara di Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut. ●RDO



“Rahmansyah Sibarani merupakan kader potensial NasDem yang bisa saja dicalonkan pada Pilkada Medan nanti”

Salman Ginting



KADER POTENSIAL NASDEM CALON WALI KOTA MEDAN

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rahmansyah Sibarani telah muncul sebagai calon potensial untuk posisi Wali Kota Medan 2024.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPW Partai NasDem, Salman Ginting mengungkapkan Partai NasDem sedang mempertimbangkan sejumlah nama yang dikenal di kalangan masyarakat Medan.

Salman Ginting menyatakan bahwa Partai NasDem memiliki banyak kader dan tokoh yang layak untuk didukung dalam Pilkada Kota Medan 2024.

Partai NasDem berencana untuk memprioritaskan promosi dan pendudukan terhadap kader mereka sebagai calon Wali Kota Medan 2024.

“Meskipun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Medan baru akan digelar setelah Pemilu 2024, kami (NasDem) akan fokus dan mengutamakan memajukan kader kami sebagai calon Wali Kota Medan. Itu kebijakan yang akan kami ambil di Pilkada Medan 2024,” ujar Ginting di Medan, beberapa waktu lalu.

Salman Ginting juga menyebutkan beberapa nama dari kader Partai NasDem yang dipertimbangkan, seperti mantan Wali Kota Medan ke-15, Rahudman Harahap, dan Ketua DPD Partai NasDem Kota Medan, Afif Abdillah.

“Rahmansyah Sibarani merupakan kader potensial NasDem yang bisa saja dicalonkan pada Pilkada Medan nanti. Begitu juga nama Rahudman Harahap dan Afif Abdillah,” jelas Salman Ginting.

Di sisi lain, Ketua Bappilu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara, Adi Mansar Lubis, mengakui bahwa PKB juga tengah mempertimbangkan beberapa nama

potensial untuk didukung dalam Pilkada Kota Medan 2024.

“PKB selain menyaring kadernya sendiri, kita juga mengikuti perkembangan tokoh dan kader partai lain yang berpotensi. Apalagi kader partai lain yang sudah dan saat ini berkoalisi di Pemilu, seperti Partai NasDem dan PKS,” ucap Adi Mansar.

Menurutnya, jika ada kader partai lain yang saat ini berkoalisi di Pilpres, maka kemungkinan besar tokoh tersebut yang akan diusung.

“Misalnya ada nama Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara Rahmansyah Sibarani yang juga merupakan sosok muda, begitu juga Rahudman Harahap, Afif Abdillah hingga kader PKB sendiri yakni Hamdan Simbolon,” tuturnya.

Adi Mansar berharap bahwa pasangan yang akan maju dalam Pilkada Medan 2024 adalah kombinasi dari laki-laki dan perempuan.

Menurutnya, jumlah perempuan di Kota Medan san-

gat besar, begitu juga dengan jumlah anak muda. Diharapkan bahwa Pilkada 2024 ini akan menghasilkan Wali Kota Medan dari hasil koalisi PKB, Partai NasDem, dan PKS.

Selain itu ada nama Bobby Nasution yang digadang-gadang akan kembali maju sebagai Calon Wali Kota Medan 2024 sebagai petahana.

Setelah sebelumnya, Bobby Nasution bersama Musa Rajekshah atau yang akrab disapa Ijeck mendapatkan mandat dari Partai Golkar untuk maju sebagai Calon Gubernur Sumut.

Namun, kini Partai Golkar telah resmi memutuskan bahwa Ijeck yang akan diusung sebagai Calon Gubernur Sumut 2024. Sehingga, kemungkinan Bobby Nasution maju sebagai Calon Walikota Medan 2024 terbuka lebar.

Wali Kota Medan Bobby Nasution sudah mendapat dukungan dari dua partai politik untuk maju di Pilgub Sumut 2024. Dukungan tersebut diberikan oleh Partai Golkar dan PAN.

Golkar sendiri memberikan dukungan ke Bobby secara tertulis seba-

gai bakal calon Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). Sedangkan PAN masih secara lisan yang disampaikan oleh Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas).

Dukungan Golkar dan PAN tersebut setelah Bobby dinilai PDIP tidak memenuhi syarat sebagai kader lagi. Langkah PDIP itu diambil usai Bobby berbeda pilihan dukungan capres-cawapres di Pilpres 2024.

Hal itu diketahui dari surat DPP Partai Golkar bernomor: Sund- 308 /GOLKAR/ XI/2023. Surat tersebut ditandatangani oleh Waketum DPP Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Sekretaris DPP Golkar Lodewijk F Paulus.

Bobby juga diberikan surat tugas sebagai bakal calon Gubsu dan bakal calon Wali Kota Medan periode berikutnya.

Partai Golkar memberikan dua surat tugas kepada menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Nasution untuk di Pilkada 2024. Bobby diberikan pilihan untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sumut atau bakal calon Wali Kota Medan untuk periode kedua.

“Pak Bobby itu dapat dua surat tugas sebagai bakal calon gubernur Sumut dan juga sebagai bakal calon wali kota Medan,” ungkap Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia di kantor DPP Golkar, Jakarta, belum lama ini.

Golkar menyerahkan kepada Bobby untuk memilih apakah akan menjadi cagub atau calon wali kota. Sementara itu, Golkar juga melakukan evaluasi internal.

“Ya pilihannya, sekarang inikan masih banyak nama-nama ya, satu daerah itu ada yang tujuh atau delapan, nah nanti kita akan nilai, nama-nama itu akan kita nilai tiap bulan nanti akan kita evaluasi,” kata Doli.

Indikator penilaian adalah orang tersebut bisa berkoordinasi, bekerja sama dan menjalankan agenda Partai Golkar di Pemilu 2024.

“Jadi kita instruksikan mereka membantu caleg, membantu struktur Partai Golkar untuk memenangkan Partai Golkar pada Pilpres dan Pileg,” jelas Doli. ●IRY





“Dua periode Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah harus dilanjutkan. Kita hadir untuk melayani umat, merawat Indonesia”

Ahmad Syaikhul

MAHYELDI MULAI MENGGODA FADLY AMRAN

Nama Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansyarullah akan kembali maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumbar 2024 sebagai petahana.

Presiden PKS Ahmad Syaikhul membuka peluang mengusung Mahyeldi dalam Pilgub Sumbar 2024. Baginya, kepemimpinan Mahyeldi di Sumbar harus dilanjutkan selama dua periode.

“Dua periode Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansyarullah harus dilanjutkan. Kita hadir untuk melayani umat, merawat Indonesia. Jika takut dengan gelombang, jangan berumah di tepi pantai. Jika hati masih goyang, enggak usah jadi Caleg partai,” ujar Syaikhul dalam keterangannya dikutip di laman resmi PKS.

Pada kesempatan tersebut, Syaikhul menekankan bahwa kader PKS di Sumbar bertekad untuk memenangkan kontestasi Pemilu di Sumbar dalam kondisi apa pun. Ia menegaskan bahwa semua sumber daya harus digerakkan untuk meraih kemenangan.

Syaikhul juga menekankan pentingnya rasa persaudaraan antar sesama Caleg PKS.

“Sehingga bisa jadi tandem solid, berbagi beban, berkolaborasi, serta bersinergi dalam meyakinkan masyarakat di daerah pemilihannya masing-masing,” ujar Ahmad Syaikhul.

Dalam kesempatan yang sama, kader PKS sekaligus mantan Kapuspen TNI Mayjen (Purn) Fuad Basya juga turut memompa semangat Bacaleg PKS di sana. Dia menekankan agar para kader meluruskan pelbagai opini negatif yang muncul dari pihak-pihak tak bertanggung jawab terkait PKS.

“Maka pejabat publik PKS, struktur, dan kader harus mampu meluruskan dengan kerja nyata dan komunikasi yang intens dengan berbagai pihak serta tokoh masyarakat. Bertarung merebut dan mempertahankan kursi untuk keberlanjutan kepemimpinan di Sumbar,” ujar Fuad.

Mahyeldi kini menjabat sebagai Ketua DPW PKS Sumbar dan Gubernur petahana Sumbar. Sebelumnya, Mahyeldi telah menjabat sebagai Wali Kota Padang selama dua periode.

PKS berhasil memenangkan Pilkada di

Sumbar sejak tahun 2010. Kala itu, kader PKS Irwan Prayitno berhasil menjadi Gubernur Sumbar selama dua periode berturut-turut. Kemudian, Irwan digantikan oleh Mahyeldi, juga kader PKS, sebagai Gubernur Sumbar setelah memenangkan Pilkada 2020.

Mahyeldi mengungkapkan pernyataan yang tampaknya menggoda Fadly Amran untuk menjadi pasangannya dalam Pilgub Sumbar 2024.

“Dapatkah kita berdampingan ke depannya?” ujar Mahyeldi.

Mahyeldi kemudian memuji rekam jejak Fadly Amran sebagai pimpinan wilayah NasDem Sumbar dan sebagai Wali Kota Padang Panjang. Menurutnya, Fadly Amran memiliki rekam jejak yang patut diakui.

“Fadly Amran memiliki rekam jejak yang patut diakui,” sambungnya.

Fadly Amran, yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPW Partai NasDem Sumbar dan Wali Kota Padang Panjang, menanggapi dengan santai. Dia menganggap pernyataan Mahyeldi sebagai ajakan untuk bersama-sama membangun Sumbar.

“Setelah pernyataan itu (kalau bisa ber-

dampingan), dia melanjutkan pernyataannya tentang kebersamaan membangun Sumbar. Konteksnya kan luas, saya tak bisa mencap langsung itu adalah sebuah ajakan untuk di Pilgub Sumbar 2024,” kata Fadly Amran.

Menurut Fadly Amran, Mahyeldi ingin menekankan kebersamaan partai politik untuk membangun Sumbar. Pernyataan Mahyeldi juga dipengaruhi oleh kehadiran sebagai Ketua DPW PKS di acara NasDem Sumbar.

“Mungkin karena momentumnya kegiatan Partai NasDem. NasDem dan PKS juga sama-sama mengusung bacapres yang sama yakni Anies Baswedan,” tambahnya.

Fadly Amran menegaskan bahwa pernyataan Mahyeldi bukanlah ajakan langsung kepada dirinya secara personal, melainkan sebagai kolaborasi antara NasDem dan PKS.

Ketua DPP Partai NasDem, Surya Paloh pernah menyatakan rasa empatinya terhadap Sumbar. Ini bukanlah sebuah pernyataan sembarangan, melainkan dari hati yang paling dalam sebagai pemimpin partai politik dan warga negara, dengan mengandalkan anak muda bernama Fadly Amran.

Ketika ditanya tentang langkah politik yang disarankan untuk Fadly Amran ke depan, Surya Paloh memberikan jawaban diplomatis, dengan menekankan pentingnya menata Kota Padang.

“Fadly memiliki waktu yang panjang

untuk mengembangkan diri. Kembangkan diri, siap menerima kritik, dan jadikan NasDem dekat dengan berbagai kalangan, terutama jurnalis,” tambahnya.

Sementara ada sosok yang digadang-gadang sebagai lawan kuat Mahyeldi adalah Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Andre Rosiade.

Sebagai juru bicara Partai Gerindra, Andre mengungkapkan bahwa banyak masyarakat di Sumbar yang mengharapkan dirinya maju sebagai calon Gubernur dalam Pilkada 2024.

Masyarakat telah mengamati kinerjanya yang baik selama menjabat sebagai anggota Dewan DPR RI, sehingga dianggap layak untuk memimpin di Sumbar.

“Kami merasa tertinggal dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Oleh karena itu, harapan masyarakat pada tahun 2024, kami membutuhkan pemimpin baru yang mampu membangun Sumbar. Salah satu tokoh yang diharapkan oleh masyarakat adalah Andre Rosiade,” tutur Andre dengan yakin.

Dia juga mengumumkan tujuan ambisinya untuk meraih pergantian gubernur dalam kontestasi Pemilu 2024. Ia berpendapat bahwa partainya harus mencari sosok gubernur baru agar pembangunan di Sumbar dapat berjalan lebih lancar.

Menurut pandangan Andre, saat ini Sumbar memerlukan perubahan positif. Diperlukan pemimpin baru yang memiliki kemampuan lebih baik dalam bekerja sama dengan seluruh kepala daerah di wilayah tersebut.

Andre mengkritik kepemimpinan Mahyeldi, gubernur saat ini, dengan menyebut bahwa pemerintah provinsi belum mampu membangun sinergi yang memadai antara kepala daerah tingkat kabupaten dan kota serta dengan pemerintah pusat. ●IRY





MAMPU BERLAYAR DI TENGAH OMBAK

Pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024, bursa calon (balon) Wali Kota (Cawako) Padang untuk periode 2024-2029 mulai menunjukkan tanda-tanda kehangatan.

Beberapa nama mulai mencuat untuk bersaing memperebutkan posisi orang nomor satu di Ibukota Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tersebut.

Di antara nama-nama yang mulai mencuat adalah Petahana Wali Kota Padang, Hendri Septa, Fadly Amran, Ekos Albar, Muharlion.

Muharlion, yang juga disebut-sebut sebagai calon kuat, bukanlah sosok yang asing dalam lingkaran Pemerintah Kota (Pemko) Padang.

Sebelumnya, Muharlion pernah diusulkan sebagai Bakal Balon Wawako Padang dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), namun pada akhirnya, rekan satu partainya, Hendri Susanto, yang melangkah hingga tahap pemungutan suara.

Kini, Muharlion dianggap sebagai calon kuat untuk menjadi Wali Kota Padang dalam periode 2024-2029.

Prediksi ini juga diperkuat oleh kemenangan PKS di tingkat DPRD Kota Padang pada Pemilu 2024 di bawah kepemimpinannya. PKS berhasil meraih tujuh kursi dengan lebih dari 80 ribu suara.

Muharlion saat ini juga memimpin PKS Kota Padang dan menjabat sebagai Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Padang.

“PKS memberikan prioritas pada kader internal. Namun, ini masih dalam pembahasan yang belum terperinci dan belum diajukan ke DPP PKS. Penjarangan akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPD) yang dikoordinir oleh Arnedi Yarmen dan Sekretaris Gufron,” ujar Muharlion.

Meskipun belum secara tegas menyatakan niatnya atau mendeklarasikan diri untuk maju sebagai Cawako Padang, Muharlion diprediksi akan

turut serta dalam kontestasi ini.

“Selama dua bulan ke depan, kami akan mempertimbangkan nama-nama yang masuk, kemudian akan diumumkan kepada masyarakat setelah itu akan berkomunikasi dengan partai politik (parpol) lainnya untuk potensi berkoalisi,” tambahnya.

Muharlion mengatakan, suara PKS pada Pileg 2024 naik cukup signifikan dibanding Pileg 2019 yang lalu.

“Pileg 2024 di Kota Padang, kita memperoleh 82 ribu suara, sedangkan Pileg 2019 kita memperoleh sebanyak 72 ribu suara. Walau memperoleh 7 kursi di DPRD Padang, kita saat ini optimis menatap Pilkada 2024 yang akan datang,” ucapnya.

Untuk pertarungan Pilkada, PKS sendiri akan menjalin komunikasi dengan partai koalisi, tetapi tidak menutup kemungkinan berkomunikasi dengan

partai mana pun.

“Politik itu kan dinamis, kita tidak menutup peluang untuk berkomunikasi dengan partai di luar koalisi nasional,” ujarnya.

Untuk calon walikota Padang sendiri, Muharlion menjelaskan PKS mengutamakan kader internal. Tetapi hal ini belum menjadi pembahasan secara detail dan belum di ajukan ke DPP PKS.

“Penjarangan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Tingkat Daerah (DPD) yang dikoordinatori Arnedi Yarmen dan Sekretaris Gufron,” jelasnya.

Beberapa nama dari internal PKS untuk menjadi calon Wali Kota Padang mulai mengampung. Mereka merupakan kader internal maupun birokrat dan pimpinan BUMD.

Selain Muharlion, beberapa nama dari internal PKS juga telah mencuat, seperti Ibrahim Irwan Prayitno, Hendri Susanto, Muhammad Iqbal, Gustami Hidayat, Muhidi, dan Mulyadi Muslim. Selain itu, terdapat juga nama-nama dari kalangan birokrat seperti Adib Alfikri dan

pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Khairul Ikhwani, yang dikenal sebagai adik dari Gubernur Sumbar periode 2010-2020, Irwan Prayitno.

Sementara, Wali Kota Padang Hendri Septa, telah memutuskan untuk kembali maju dalam Pilkada Kota Padang tahun 2024.

Hendri Septa menyampaikan bahwa keputusannya untuk maju kembali didorong oleh aspirasi masyarakat yang menginginkan kepemimpinannya kembali di Kota Padang.

“Dengan izin Allah, saya akan maju. Setelah beberapa pertemuan, masyarakat berharap saya kembali untuk memimpin,” ujar Hendri Septa, beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Hendri Septa menyatakan bahwa menurut masyarakat masih banyak tugas dan program yang perlu diselesaikan guna memajukan Kota Padang.

“Saat ini, saya sedang fokus untuk menuntaskan program-program unggulan yang telah ditetapkan sejak awal. Saya hanya fokus bekerja saat ini,” katanya.

Beberapa program unggulan Hendri Septa pada Pilkada 2019 antara lain, pembangunan 500 ruang kelas baru, kelanjutan penyelenggaraan pesantren Ramadhan, betonisasi jalan lingkungan, peningkatan dana stimulan kecamatan menjadi Rp 1 miliar dan kelurahan Rp 100 juta.

Selain itu, Hendri Septa juga berencana untuk meningkatkan efektivitas reformasi, budaya kerja aparatur dan pelayanan, pengembangan kawasan wisata terpadu Gunung Padang, pulau-pulau kecil di wilayah timur, serta melanjutkan penataan angkutan umum.

Di antara program-program tersebut juga termasuk revitalisasi sarana prasarana olahraga tingkat RT RW, peningkatan dana operasional RT, RW, guru MDA, dan imam masjid, serta peningkatan indeks kemudahan berusaha.

“Dengan izin Allah, saya yakin semua program unggulan ini akan tercapai 99 persen tahun ini,” tutup Hendri Septa.

Dikatakan Founder Ranah Rantau Circle, Ilhamsyah Mirman, episentrum politik kota Padang diprediksi tidak akan menarik perhatian jajaran pengurus pusat atau pendiri partai sebagai pemilik, untuk turun bermain.

Bagi Hendri Septa, target utamanya dalam menghadapi prosesi ini adalah bagaimana mempertahankan, bahkan memperpanjang jabatan untuk dua periode. Apapun itu.

“Seorang politikus puncak harus memiliki lobi yang kuat, dan mampu berlayar di tengah-tengah ombak,” tulis Isa Kurniawan dalam salah satu kolomnya. ●IRY





“Siapapun berhak untuk maju dalam Pilgub Bali, menurut saya pribadi, Wayan Koster masih menjadi yang terbaik untuk Bali”

I Gusti Putu Mulyawan

INFO PILKADA

Minggu I • Maret 2024

11

WAYAN KOSTER TERBAIK UNTUK BALI

Dalam wacana terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, muncul dua nama kuat sebagai kandidat Calon Gubernur (Cagub) Bali, yakni I Wayan Koster dan I Nyoman Giri Prasta.

Salah satu tokoh politik asal Karangasem, I Gusti Putu Eka Mulyawan, menyatakan bahwa kedua nama ini memiliki potensi besar jika bisa berpasangan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024 mendatang.

Pria yang akrab disapa Gus Wawan itu menjelaskan bahwa terkait rekomendasi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, ia berpendapat bahwa Wayan Koster masih merupakan pilihan terbaik untuk Gubernur Bali 2024.

Namun, menurut Gus Wawan, potensi besar terlihat jika Wayan Koster bisa bersanding dengan Giri Prasta di Pilgub Bali 2024. Kedua sosok ini dianggap sebagai putra-putra terbaik yang sama-sama memiliki visi besar untuk membangun Bali menuju Era Baru.

“Siapapun berhak untuk maju dalam Pilgub Bali. Saat ini sudah muncul beberapa nama, namun menurut saya pribadi, Wayan Koster masih menjadi yang terbaik untuk Bali,” ungkap Wawan.

Terkait rekomendasi dari partai, itu urusan internal partai. Dirinya berharap tidak ada lagi ego, dan sebaiknya kedua orang ini bisa bersatu.

“Jika berpikir untuk kepentingan masyarakat, kedua putra terbaik Bali ini bersatu pasti akan memberikan dampak luar biasa untuk Bali,” ungkap Gus Wawan.

Gus Wawan menambahkan bahwa selama menjabat sebagai Gubernur Bali periode 2018-2024, kebijakan Wayan Koster dianggap memberikan dampak positif bagi pembangunan di Bali.

Sementara itu, Giri Prasta sebagai Bupati Badung juga memiliki kelebihan sendiri karena telah menjadi pemimpin yang dekat dengan rakyatnya.

Oleh karena itu,

sangat rasional jika keduanya bisa meredam ego masing-masing dan saling menggandeng kekuatan untuk membangun masa depan Bali.

“Kita bisa lihat bagaimana kedua tokoh ini menjadi pemimpin di masyarakat, sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan, hal yang wajar. Saya berharap dua putra terbaik Bali ini bisa bersatu dan menjadi kekuatan yang membawa Bali ke arah yang lebih baik,” pungkasnya.

Diketahui, Lembaga survei Archi Indonesia (Archi Research Strategic Consulting) telah merilis hasil survei terbaru menjelang Pilgub Bali 2024. Survei ini melibatkan 1.200 responden.

Menurut hasil survei

tersebut, Gubernur Bali periode 2018-2023, Wayan Koster, dan Bupati Badung, I Nyoman Giri Prasta, mendapat elektabilitas tertinggi.

Koster memperoleh 18,2 persen sedangkan Giri Prasta 15,9 persen. Sementara itu, tokoh muda Bali, Anak Agung Manik Danendra, berada di urutan ketiga dengan 14,7 persen.

“Ada tiga nama yang menguat surveinya di atas 10 persen. Ketika ada tiga nama yang menguat, itu artinya berpotensi tiga calon di Pilgub Bali,” kata perwakilan Archi Indonesia di Bali, Ali Imran.

Menurut Ali, pengalaman dari 5-10 tahun terakhir menunjukkan bahwa ketika calon memiliki persentase survei di atas 10 persen, mereka cenderung

unggungan untuk berkolaborasi.

“Contohnya, Pak Koster tidak mungkin akan mengajak Giri Prasta untuk berpasangan jika survei menunjukkan Giri Prasta di atas 10 persen,” jelasnya.

Ali melihat ada peluang bagi Bupati Badung tersebut untuk maju dalam Pilgub Bali melalui jalur independen.

Dia juga menyarankan Giri Prasta untuk keluar dari PDI Perjuangan dan mencari partai lain sebagai kendaraan politiknya jika elektabilitas dan popularitasnya tetap tinggi hingga pemilihan.

“Kalau elektabilitas dan popularitas Pak Giri Prasta konsisten hingga pemilihan, maka kemungkinan besar dia akan maju lewat jalur independen atau bergabung dengan partai lain,” tambah Ali.

Namun, Ali mengingatkan bahwa dalam kontestasi Pilgub yang besar, kemungkinan terjadi pergeseran tergantung pada hasil pilpres nanti.

“Presiden yang terpilih akan sangat memengaruhi dinamika Pilgub,” tegasnya.

Selain tiga nama tersebut, survei ini juga mencantumkan beberapa calon potensial lainnya untuk Gubernur Bali 2024, seperti Tjokorda Oka atau Cok Ace (10%), Made Mudarta (9,7%), I Made Mahayastira (7,9%), Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra (7,8%), Arya Wedakarna (7,2%), Gede Sumarjaya Linggih (4,2%), Gede Pasek Suardika (3,9%), dan yang lainnya tidak tahu.

Di sisi partai politik di Bali, PDI Perjuangan masih menduduki peringkat tertinggi sebagai parpol yang paling dipilih saat Pemilu 2024, dengan elektabilitas sebesar 17,86 persen.

Disusul oleh Golkar dengan 15,35 persen, Demokrat 14,35 persen, NasDem 10,27 persen, dan Gerindra 7 persen.

Pengamat politik Universitas Pendidikan Nasional (Undiknas) I Nyoman Subanda memandang, Koster masih berpotensi mendapat rekomendasi untuk maju dalam Pilgub Bali 2024 oleh PDIP.

Pertimbangannya, kata Subanda, yakni Koster berani bersuara untuk menolak Piala Dunia U20 diselenggarakan di Bali.

“Logika politiknya, karena Koster sudah mau mengikuti DPP tentang berkomentar atau melarang Piala Dunia, dan itu juga dilakukan Ganjar, itu janji DPP.

Sebelumnya, Giri Prasta telah menanggapi hasil survei tersebut dengan santai.

“Saya tidak ikut. Saya pun sudah dalam rapat partai menyatakan bahwa saya tidak akan ikut dalam apapun,” katanya. •IRY



“Jika dana BOS masih seperti sekarang ini, tentu penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis perlu diperkuat dengan payung hukum dan peningkatan dana BOS agar bisa dilaksanakan”

Hetifah Sjaifudian



TOLAK MAKAN SIANG GRATIS PAKAI DANA BOS

Komisi X DPR menolak keras wacana pemerintah yang akan mengalihkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk realisasi program Makan Siang Gratis gagasan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakauming Raka.

Wakil Ketua Komisi X DPR, Abdul Fikri Faqih, menegaskan negara harus taat dengan regulasi anggaran pendidikan yang telah ditetapkan.

“Demi program ambisius, jangan korbankan pendidikan kita!” tegas Fikri di Jakarta, Jumat, 30 Februari 2024.

Perlu diketahui, dana BOS merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Regulasi tersebut mengamanatkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya.

Oleh sebab itu, dana BOS hadir agar generasi muda dapat mengenyam pendidikan dasar tanpa kendala biaya pendidikan yang memberatkan.

“Jadi, jangan bebankan BOS untuk program yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Silakan, pakai anggaran lain,” serunya.

Politisi Fraksi PKS itu juga menyayangkan keputusan pemerintah yang diam-diam mengurangi alokasi dana BOS sebanyak Rp539 miliar pada 2023 dengan alasan defisit APBN. Terlebih lagi, sebesar 50 persen BOS juga digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga kependidikan honorer.

“Kebijakan seperti ini tinggal tunggu bom waktu saja,” cemasnya.

Fikri pun mendesak pemerintah, terutama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi serta Kementerian Agama untuk memperjuangkan agar alokasi dana BOS tidak diutak-atik. Baginya, kebijakan program Makan Siang Gratis ini masih belum jelas anggaran maupun nomenklatur.

“Apalagi ini program non-pemer-

intah dari paslon yang belum resmi dilantik dan menjabat. Semua ada aturannya dalam undang-undang. Kami harus perjuangkan dana BOS murni hanya untuk pendidikan,” ujar Fikri.

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Cucun Ahmad Syamsurijal, pun menganggap aneh pemerintah sudah membahas program makan gratis dari Prabowo Subianto dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin, 26 Februari 2024. Baginya, situasi itu tak wajar mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan pemenang Pilpres 2024.

“Memang biasanya sudah ada tim untuk menjembatani transisi kepemimpinan supaya efektif dalam perencanaan dan APBN tidak bongkar pasang. Tetapi, pembahasan di kabinet yang belum ditetapkan pemenang itu tidak wajar,” ujar Cucun, Selasa, 27 Februari 2024.

Ia pun meminta pemerintah menunggu dan menghormati proses penghitungan sah dari KPU. Selain itu, Cucun mendesak agar pemerintah fokus untuk menyelesaikan berbagai program yang masih belum terealisasi.

“Selesaikan dulu program yang menjadi prioritas periode Jokowi-Ma'ruf, jangan terburu-buru bahas untuk program presiden yang lain,” ucap politikus PKB ini.

A n g g o t a
Komisi X DPR dari Fraksi Partai Golkar, Hetifah Sjaifudian, menyebut, jika kebijakan ini sudah menjadi kebijakan nasional yang merupakan

kan penjabaran visi misi presiden dan wakil presiden terpilih kelak, maka secara kelembagaan, DPR perlu mengambil sikap secara resmi untuk memastikan kebijakan strategis ini bisa didukung oleh anggaran yang memadai dan bisa diimplementasikan.

“Terkait wacana pendanaan melalui mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS), bisa saja menjadi opsi. Karena dana BOS disalurkan langsung ke sekolah, maka dalam pelaksanaannya nanti bisa lebih terdesentralisasi dengan pertanggungjawaban yang lebih baik,” kata Hetifah, Minggu, 3 Maret 2024.

Hanya jika akan dilaksanakan di 2024, kata dia, tentu usulan ini perlu disampaikan dan dibahas terlebih dahulu bersama DPR. Sebab dasar hukum atau nomenklatur yang mengatur terkait program tersebut memang belum ada.

Makan siang gratis memang baik untuk peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan konsentrasi belajar anak-anak di sekolah. Namun, jika penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis menggunakan alokasi dana eksisting, maka ada kekhawatiran implikasi keuangan dari kebijakan tersebut terhadap anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan sebelumnya.

“Selain itu perlu diantisipasi potensi penyalahgunaan dana jika petunjuk teknisnya kurang jelas,” kata Hetifah.

Saat ini, pemanfaatan dana BOS terkendala keterbatasan jumlah anggaran, ketidakmerataan distribusi dan nilai kemahalan. Jika BOS digunakan untuk program makan siang gratis, perlu diperhatikan implikasinya, seperti dibutuhkannya dana tambahan,

dan pengaturan mekanisme pengadaan, serta pertanggungjawabannya.

“Jika dana BOS masih seperti sekarang ini, tentu penggunaan dana BOS untuk makan siang gratis perlu diperkuat dengan payung hukum dan peningkatan dana BOS agar bisa dilaksanakan,” kata Hetifah.

Di sisi lain, Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menolak rencana program makan siang gratis Prabowo-Gibran yang disebut akan menggunakan dana BOS. Kepala Bidang Advokasi Guru P2G, Iman Zanatul Haeri, beralasan tenaga pendidik maupun infrastruktur sekolah di berbagai daerah saat ini masih banyak bergantung pada dana bantuan itu.

“Sebagian besar dana BOS dipakai untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Ini sama saja dengan memberi makan gratis siswa dengan cara mengambil jatah makan para gurunya. Sebab ada guru honorer yang hanya mengandalkan dana BOS,” kata Iman, Minggu, 3 Maret 2024.

Masalah berikutnya adalah anggaran BOS yang saat ini diambil dari APBN dianggap belum cukup untuk menyejahterakan guru, memperbaiki fasilitas sekolah, dan memajukan kualitas pendidikan Indonesia secara keseluruhan.

Dirinya menilai pemerintah mestinya berfokus mengatasi persoalan tersebut, alih-alih menambah beban dana BOS sebatas untuk program makan siang gratis. Pihaknya juga menyoroti alokasi dana BOS yang menurun setiap tahunnya.

“Misal, dari 2022 ke 2023, dana BOS berkurang hingga Rp539 miliar. Jadi, kalau menggunakan dana BOS, dikhawatirkan akan mengorbankan pembiayaan sektor lain yang lebih esensial dalam belanja sekolah, seperti upah guru honorer,” lanjut Iman.

Sementara itu, Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan P2G, Feriyansyah, berpendapat, tim perumus kebijakan Prabowo-Gibran perlu meninjau ulang dan memerinci rencana tersebut. Dia menilai bahwa informasi yang sampai kepada publik saat ini hanya bersifat parsial. Apabila program makan siang gratis betul-betul diterapkan, pihaknya ingin pemerintah memperhatikan negara-negara yang telah berpengalaman melaksanakan program serupa untuk menghindari masalah-masalah potensial, termasuk tidak tercapainya tujuan program.

“Di Amerika Serikat awal 2020, program makan siang gratis di sekolah gagal bukan karena pandemi, tetapi karena para siswa tidak mengambil jatah makan siang gratis. Ternyata label makan siang gratis hanya untuk orang miskin, membuat anak-anak memilih tidak makan dan program ini ditutup di beberapa sekolah,” tandasnya. ●RDO





“Kita harus sadar bahwa masih banyak bagian dari rakyat kita yang membutuhkan keuangan negara hadir dan menyelesaikan masalah”

Sri Mulyani Indrawati

MENKEU BARU BANYAK PR BERAT

Indonesia akan memiliki presiden baru pada Oktober 2024. Tentunya, Presiden terpilih kelak akan memilih Menteri Keuangan yang akan mendampingi. Setidaknya ada beberapa isu yang akan dihadapi Menkeu baru ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan bagi calon menteri keuangan dalam pemerintahan baru nanti. Dia mengingatkan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh pemerintah soal kesejahteraan di Indonesia.

Menurutnya, pekerjaan rumah itu salah satunya bisa diselesaikan melalui keuangan negara. “Kita harus sadar bahwa masih banyak bagian dari rakyat kita yang membutuhkan keuangan negara hadir dan menyelesaikan masalah,” kata Sri Mulyani dalam pidato di Wisuda STAN 2023, dikutip Sabtu, 2 Maret 2024.

Menurutnya, keuangan negara merupakan alat untuk mencapai tujuan bernegara, yaitu menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan itu, kata dia, pekerjaan rumah pertama yang harus diselesaikan adalah pembangunan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dan kesehatan.

Sri Mulyani pun sering mengingatkan mengenai keuangan negara. Dalam kesempatan berbeda, Sri Mulyani menegaskan uang negara adalah uang seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dilakukan secara transparan.

“Kementerian Keuangan berkewajiban dan bertanggung jawab menyampaikan ke masyarakat secara konkret apa artinya kehadiran negara. Negara bisa hadir karena ada uang negara atau yang disebut #UangKita,” katanya.

Dia pun mengatakan, uang negara juga digunakan sebagai sumber dana bantuan sosial (bansos) yang dibagikan pemerintah. Dengan demikian, dia ingin rakyat dari semua kalangan tahu dan paham mengenai hal ini.

“Masyarakat juga akan ikut tentu dalam mengawasi, ikut memiliki, karena mereka yang mampu (orang kaya) membayar pajak dan tentu mereka ingin tahu uang pajaknya untuk apa. Sedangkan yang tidak mampu (orang miskin) mendapat bantuan dari pemerintah dan mereka harus tahu uangnya dari mana,” ujarnya.

Saat ini, berdasarkan hasil

quick count dan real count Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul telak dibandingkan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Prabowo dikabarkan mulai menyiapkan susunan kabinetnya, termasuk calon menteri keuangan menggantikan petahana Sri Mulyani. Melansir dari Bloomberg, Rabu, 28 Februari 2024, Prabowo mengincar para mantan bankir untuk menjadi menteri keuangannya.

Dirinya dikabarkan mencari para teknokrat yang dapat mengamankan pendanaan untuk janji-janji kampanyenya sembari menjunjung tinggi kehati-hatian fiskal. Nama-nama yang muncul di antara para bankir, yakni Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin; Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo; Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar; dan Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar.

Berdasarkan informasi dari narasumber yang enggan disebutkan namanya, kelima nama tersebut dipandang paling cocok untuk peran tersebut karena keahlian keuangan mereka serta kepemimpinan yang efektif.

Prabowo pun tidak akan melibatkan politik untuk posisi menteri keuangan, karena dia melihat posisi itu berada di atas politik dan membutuhkan ketajaman dalam mengelola anggaran. Salah satu dari lima nama tersebut berpotensi menggantikan Sri Mulyani.

drawati, satu-satunya wanita yang pernah ditunjuk untuk menduduki posisi tersebut sejak kemerdekaan Indonesia 1945.

Di bawah kepemimpinannya, Sri Mulyani berhasil mengelola perekonomian dalam gejolak yang disebabkan oleh pandemi dan kemudian mengendalikan defisit anggaran kembali ke dalam batas yang sah setahun lebih awal dari yang dijanjikan. Meski susunan tim sukses Prabowo-Gibran saat ini mungkin semuanya laki-laki, namun sumber mengatakan bahwa tidak menutup kemungkinan adanya perubahan nama dari brusa calon menkeu tersebut.

Rencana pembentukan kabinet ini masih berada pada tahap awal, dan baru akan diperdalam ketika Prabowo-Gibran resmi dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU pada 20 Maret 2024 mendatang.

Siapa pun nantinya yang terpilih akan memiliki tanggung jawab besar untuk membantu Prabowo memimpin negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara ini di tengah risiko geopolitik dan gangguan rantai pasokan yang muncul dari persaingan AS dan China.

Calon orang nomor 1 di Kementerian Keuangan tersebut harus menjaga

disiplin fiskal, yang sangat penting dalam menstabilkan rupiah dan meyakinkan investor asing, sambil mengamankan pendanaan yang cukup untuk rencana belanja besar-besaran milik Prabowo. Pasalnya, proyeksi belanja besar tersebut dapat mencapai Rp460 triliun, lebih besar dari seluruh defisit anggaran 2023, untuk makan siang dan susu gratis kepada lebih dari 80 juta anak. Harapannya, program ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi perempuan dan usaha kecil.

Namun, sejumlah sumber Bloomberg mengatakan line-up alias nama-nama calon Menteri Keuangan tersebut bisa saja berubah. Sebab, diskusi pembentukan kabinet masih berada dalam tahap awal.

Menteri BUMN, Erick Thohir, pun buka suara terkait dengan empat calon yang digadang-gadang akan menjadi Menteri Keuangan. Dia mengatakan, keempat sosok calon Menteri Keuangan yang digadang-gadang itu semuanya punya kapasitas yang bagus. Ia tak merinci kelebihan dari masing-masing figur.

“Saya bukan posisinya untuk menilai pasti ada otoritas yang lebih mengerti, empat-empatnya bagus,” ujar Erick, Senin, 4 Maret 2024.

Ketua umum PSSI itu menyebutkan semua sosok punya kelebihan masing-masing. Namun, ia tetap meminta semua keputusan ada di tangan pemerintah selanjutnya setelah Presiden Jokowi. “Saya gatau itukan mesti tanya pemerintahan ke depan,” ungkapnya. • RDO





AWASI PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI KUALA LUMPUR

Pimpinan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) rencananya akan mengawasi secara langsung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kuala Lumpur, Malaysia.

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, memastikan, salah satu pimpinan Bawaslu akan mengawal secara langsung proses PSU di Kuala Lumpur. Sebab, proses pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur perlu dikawal secara melekat oleh Bawaslu.

“Antara saya, Pak Puadi, atau Pak Herwyn. KPU juga demikian salah satu anggota (pimpinan KPU RI),” katanya kepada wartawan di Gedung Bawaslu, Selasa, 5 Maret 2024.

Bagja menyampaikan, KPU harus secara cermat dalam melakukan perbaikan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Kuala Lumpur. Selain itu, pihaknya sudah akan mengawasi secara melekat proses pemungutan suara ulang tersebut. PSU di Kuala Lumpur tidak lagi menggunakan metode POS.

“Ya (antisipasi) di TPS, salah satunya di KSK (Kotak Suara Keliling) bukan di POS, sama perbaikan pencermatan kembali terhadap data pemilih yang sudah ada (sekitar) 400 ribu seperti itu,” jelasnya.

Terkait perkembangan pencermatan data pemilih, Bagja menyarankan untuk menanyakan langsung kepada KPU. Sebab, pencermatan data pemilih merupakan tugas dari KPU. Teranyar, KPU akan memakai data pemilih dari daftar hadir yang mencoblos di Kuala Lumpur.

“Tanya KPU, pencermatannya sudah sampai mana,” ujarnya.

Anggota Bawaslu dua periode ini berharap, pemutakhiran data pemilih di Kuala Lumpur diselesaikan.

kan sebelum pelaksanaan PSU diselenggarakan. Selain itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga telah memberikan data pemilih potensial pemilu kepada KPU pada awal tahapan Pemilu Serentak 2024. “Sebelum 9-10 (Maret)-lah,” imbuhnya.

Bagja menjelaskan alasan Bawaslu merekomendasikan kepada KPU agar dilakukannya pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia. Bawaslu menemukan data cokolit yang dilakukan PPLN Kuala Lumpur hanya 12 persen dari pemilih di daftar pemilih tetap.

“Ada beberapa hal yang ditemukan dalam proses verifikasi pencermatan terhadap daftar pemilih, dan juga daftar hadir di Kuala Lumpur,” katanya.

Bagja menyampaikan, jika berdasarkan daftar hadir tersebut, Bawaslu menyakini pemilih yang sudah memberikan hak pilihnya pada 11 Februari 2024, tidak akan mencoblos di hari pemungutan suara ulang.

“Yang ada pada saat ini maka agak sulit dipastikan pemilih yang sudah memilih pada tanggal 11 Februari itu tidak memilih kembali (pada saat pemungutan suara ulang),” jelasnya.

Maka dari itu, agar tidak terjadi pemilih mencoblos dua kali, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang dengan metode TPS. “Maka kami merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang juga di metode TPS,” katanya.

Bawaslu, kata Bagja, juga mendapatkan informasi dari Panwas Kuala Lumpur bahwa sulit untuk memastikan pemilih tidak mencoblos dua kali pada pemungutan suara ulang.

“Hasil pengawasan teman-teman di lapangan oleh Panwas Kuala Lumpur, maka dipastikan agak sulit untuk

memastikan si pemilih untuk tidak memilih dua kali. Untuk tidak terjadi nanti pemungutan suara ulang kembali, maka kita pemungutan suara ulang juga di TPS,” ucapnya.

Bagja menuturkan, pemilih yang menggunakan metode POS atau Kotak Suara Keliling (KSK) dapat memiliki di TPS. “Ada yang tidak memilih atau yang tidak mendapatkan surat suara di metode POS dan KSK itu bisa memilih di TPS,” jelasnya.

Pertanyaannya, kata Bagja, apakah kemudian yang bersangkutan, yang datang ke TPS itu dapat dipastikan tidak bisa memilih kembali dengan daftar hadir yang sangat sulit kemudian diverifikasi. Maka salah satu rekomendasinya untuk mengulang juga di TPS.

Bagja menyampaikan, pemilih dari daftar pemilih khusus (DPK) pada pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur akan membludak. Kata Bagja, membludaknya pemilih pada pemungutan suara ulang hari diantisipasi oleh KPU.

Bagja menyampaikan, tempat pemungutan suara juga harus mempersiapkan beberapa antisipatif agar para pemilih yang ingin mencoblos tidak membludak.

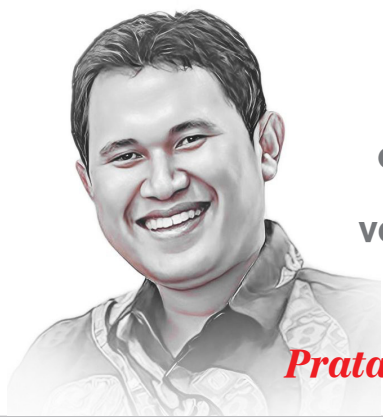
“Ya harus ada penempatan dan juga sekarang tergantung dari frames yang akan digunakan sebagai tempat pemungutan suara,” ujarnya.

Bagja mengatakan pihaknya memberikan rekomendasi kepada KPU selaku penyelenggara pemungutan suara ulang agar tidak terjadi pelanggaran Pemilu pada proses pemungutan suara. Tidak hanya itu, Bawaslu juga akan melakukan pengawasan secara melekat pada proses pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia.

Fokus Bawaslu saat pemungutan suara ulang ada memastikan para pemilih tidak menggunakan hak suaranya lebih dari satu. Sebab, jika ditemukan ada yang mencoblos dua kali atau lebih dari satu akan berpotensi pemungutan suara ulang kedua kalinya.

“Kami kan hanya merekomendasikannya dan juga memastikan agar tidak terjadi pemilih ganda atau pemilih yang bisa mencoblos dua kali,” katanya. ● RDO





“Harus menjadi catatan, source code yang harus dibuka ke publik adalah source code dari sirekap versi awal yang dipergunakan oleh KPPS, bukan sirekap yang sudah direvisi oleh KPU”

Pratama Persadha

INFO
KPU

15

Minggu 1 • Maret 2024

SIREKAP TIDAK AKURAT REAL COUNT DISETOP

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghentikan penayangan real count atau raihan suara sementara di laman publikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) sejak Selasa malam, 5 Maret 2024. Komisioner KPU, Idham Holik, menyebut, penyetopan tayangan real count di laman web pemilu2024.kpu.go.id bersifat permanen.

“**G**rafik angka perolehan suara tidak akan ditampilkan kembali,” kata Idham di Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024.

Idham menjelaskan, penghentian permanen dilakukan karena tayangan real count di laman tersebut menimbulkan polemik. Pasalnya, publik riuh merespons kesalahan angka raihan suara di laman tersebut.

Selain itu, sebagian orang menjadikan kesalahan angka raihan suara itu untuk menyebarkan disinformasi terkait rekapitulasi manual, yang merupakan proses resmi penetapan raihan suara peserta pemilu. Padahal, hasil real count bukan acuan resmi dalam penetapan hasil penghitungan suara.

“Akibat ketidakakuratan sebagian kecil hasil pembacaan Sirekap telah memunculkan polemik dan bahkan disinformasi atas proses rekapitulasi perolehan suara peserta pemilu,” ujar Idham.

Dengan disetopnya penayangan real count, kata Idham, laman pemilu2024.kpu.go.id kini difokuskan untuk mempublikasikan dokumen C.Hasil plano dan D.Hasil (dokumen resmi rekapitulasi suara). C.Hasil merupakan dokumen otentik hasil penghitungan suara di TPS. Adapun formulir D.Hasil adalah dokumen resmi rekapitulasi suara mulai dari tingkat kecamatan.

“Kini masyarakat dapat mengaksesnya. Oleh karena itu, sekarang Sirekap difokuskan untuk tampilan foto formulir Model C.Hasil Plano, yang selama ini pada umumnya pengakses Sirekap tidak melihatnya,” ujarnya.

Idham juga telah memerintahkan semua KPU daerah untuk mengunggah dokumen hasil rekapitulasi ke Sirekap, sehingga bisa diakses publik lewat laman pemilu2024.kpu.go.id.

“UU Pemilu menyatakan hasil resmi perolehan suara peserta pemilu berdasarkan hasil rekapitulasi secara berjenjang,” kata Koordinator Divisi Teknis Penyelenggaraan

Pemilu KPU itu.

Sebagai gambaran, real count KPU dilakukan menggunakan serangkaian proses lewat aplikasi Sirekap. Pertama, petugas KPPS memfoto C.Hasil plano, lalu diunggah ke aplikasi Sirekap.

Lantas, teknologi optical character recognition (OCR) yang tersemat di aplikasi itu mengkonversi raihan suara dari format gambar menjadi teks. Hasil konversi dari semua TPS selanjutnya diakumulasi menjadi real count, lalu diunggah di laman pemilu2024.kpu.go.id.

Di laman tersebut, biasanya ditampilkan total raihan suara pasangan capres-cawapres secara nasional maupun di setiap provinsi. Tayangan hasil penghitungan suara sementara itu dilengkapi grafik lingkaran.

Di laman yang sama, biasanya ditampilkan total raihan suara partai politik secara nasional, per provinsi, ataupun per daerah pemilihan. Penayangan dilengkapi diagram batang. Selain itu, ditampilkan pula total raihan suara caleg.

Selama ini, publik menemukan ada kesalahan angka raihan suara yang ditampilkan di pemilu2024.kpu.go.id dibanding dokumen C.Hasil. Hal itu diakui KPU terjadi karena tidak akuratnya teknologi OCR dalam mengkonversi foto menjadi teks.

Ketidakakuratan angka teranyar yang ditemukan publik adalah terkait lonjakan suara PSI. Beberapa hari setelah itu, KPU menghentikan penayangan real count.

Berdasarkan pantauan pada Selasa malam, sudah tidak ada lagi data total raihan suara capres-cawapres, partai politik untuk Pileg DPR, partai politik untuk Pileg DPRD, partai politik untuk Pileg DPRD kabupaten/kota, ataupun calon anggota DPD di laman pemilu2024.kpu.go.id.

Di laman tersebut kini hanya tersedia doku-

men C.Hasil dan D.Hasil. Publik bisa mengunduh formulir tersebut untuk mengecek satu per satu raihan suara peserta pemilu.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja mengakui, pihaknya yang dulu merekomendasikan agar tayangan real count di laman publikasi Sirekap KPU dihentikan. Namun, pihaknya hanya merekomendasikan penghentian sementara waktu.

“Kan kita minta dulu diberhentikan sementara untuk memperbaiki (permasalahan sistem). Pertanyaannya sekarang, diberhentikan sementara atau bagaimana?” kata Bagja di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu, 6 Maret 2024.

Bagja menyebut, apabila penyetopan bersifat sementara, maka KPU harus menjelaskan berapa lama durasinya. Ia menyayangkan apabila penayangan dihentikan permanen karena KPU sudah mengeluarkan biaya untuk membangun aplikasi Sirekap.

Pakar Keamanan Siber dari Communication and Information System Security Research (CISSReC), Pratama Persadha, mengatakan, KPU semestinya mempublikasikan sebagian source code Sirekap, terutama pada bagian pembacaan OCR dan OMR, serta bagian memasukkan data hasil bacaan ke dalam database sirekap. Hal itu diperlukan untuk mengetahui kebenaran permasalahan Sirekap yang menjadi sorotan publik belakangan.

“Harus menjadi catatan, source code yang harus dibuka ke publik adalah source code dari sirekap versi awal yang dipergunakan oleh KPPS, bukan sirekap yang sudah direvisi oleh KPU,” ucap Pratama.

Dia mengatakan, selain lokasi server, salah satu polemik sirekap lainnya memang masalah kesalahan antara data yang ada di Sirekap dengan foto formulir C hasil yang diunggah oleh anggota KPPS.

Perbedaan data itu oleh KPU dinyatakan sebagai sebuah kesalahan pembacaan OCR dan OMR Sirekap dari formulir C hasil. Namun, se-

bagian besar masih meragukan hal tersebut dan menganggap kesalahan data tersebut adalah sesuatu yang disengaja serta algoritmik.

“Kesalahan data yang ditemukan sampai saat ini adalah tidak sinkronnya antara data yang ditampilkan oleh sirekap dengan formulir C hasil yang didokumentasikan oleh KPPS di level TPS. Hal tersebut bisa saja karena ada kesalahan pembacaan OCR dan OMR atau mungkin juga merupakan sebuah kesalahan yang disengaja untuk keperluan tertentu,” jelas dia.

Kesalahan tersebut, kata Pratama, diperparah lagi dengan tidak adanya fitur edit di Sirekap untuk pemilihan presiden di level TPS. Padahal, petugas bisa melakukan edit untuk Pileg. Perbaikan kesalahan tersebut dia nilai seharusnya bisa langsung direvisi di TPS di depan banyak saksi, sehingga tidak menimbulkan kekisruhan lebih lanjut.

“Selain itu, sepertinya sistem entry data yang dipergunakan oleh KPU tidak memiliki fitur error checking. Di mana seharusnya hal tersebut mudah saja dimasukkan pada saat melakukan pembuatan sistem, sehingga kesalahan memasukkan data baik disengaja maupun tidak disengaja tidak dapat terjadi,” kata Pratama.

Jika dilakukan error checking pada saat entry, kata dia, maka sistem akan menolak apabila jumlah perolehan suara pemilihan presiden diatas jumlah suara yang sah. Kemudian sistem juga akan menolak jika penjumlahan jumlah suara sah ditambah surat suara tidak sah tidak sama dengan baris jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah.

“Salah satunya adalah kritik dari dosen Al Ridho Rahmadi, kesalahan di sistem Sirekap adalah sesuatu yang algoritmik, bukan sekadar kesalahan pembacaan OCR dan OMR. Hal tersebut bisa saja benar karena sampai sekarang KPU tidak mengizinkan publik untuk melakukan source code auditing untuk memastikan bahwa kesalahan sirekap tersebut bukanlah sesuatu yang memang disengaja,” terang dia.

Selain itu, tidak adanya error checking sehingga jumlah suara dalam satu TPS bisa melebihi jumlah DPT juga harus ikut diperiksa. Termasuk di dalamnya kenapa pada Pilpres di sistem sirekap KPPS tidak dapat melakukan edit data untuk melakukan perbaikan datanya sesuai dengan formulir C hasil, padahal pengubahan data tersebut bisa dilakukan untuk bagian Pileg.

“Melihat performa KPU sebelum sampai setelah pencoblosan dilakukan dan proses rekapitulasi berjalan sampai saat ini bisa dibilang bahwa manajemen sistem IT KPU sangatlah buruk. Dimulai dengan terjadinya kebocoran data DPT sampai dengan kisruhnya perhitungan menggunakan sistem sirekap yang bahkan menuai banyak kritik baik dari kalangan politisi, akademisi maupun praktisi keamanan siber,” kata dia. ●RDO



“Serangkaian inovasi telah banyak dilakukan oleh Manajemen Bank Sumsel Babel secara keseluruhan, mulai dari tingkat staf sampai dengan top management yang dalam hal ini meliputi seluruh jajaran pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi)”

Agus Fatoni



APRESIASI SEDERET INOVASI BANK SUMSEL BABEL



Penjabat Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni, mengapresiasi sederet inovasi yang dilahirkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel) sehingga mengalami kemajuan pesat.

Hal ini diungkapkan Fatoni dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahun Buku 2023 dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Tahun 2024 Bank Sumsel Babel di Hotel Fairmont, Senayan, Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024.

“Sebagai Institusi perbankan, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung saat ini telah mengalami kemajuan. Serangkaian inovasi telah banyak dilakukan oleh Manajemen Bank Sumsel Babel secara keseluruhan, mulai dari tingkat staf sampai dengan top management yang dalam hal ini meliputi seluruh jajaran pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi) PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,” ucap Fatoni.

“Hal ini menyebabkan PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjadi bank daerah yang dapat diperhitungkan oleh kalangan perbankan dalam kancah penghimpun dan penyalur dana masyarakat dan pemerintah yang ada di Sumatera Selatan. Adanya kemajuan tersebut diharapkan akan berpengaruh dengan kontribusi PT Bank Pembangunan Daerah Sumsel dan Babel terhadap Pendapatan Asli Daerah,” sambungnya.

Menurutnya, kegiatan RUPS dan RUPSLB seperti ini sangatlah penting. Bahkan dirinya juga mengapresiasi seluruh jajaran Bank Sumsel Babel yang telah melaksanakan kegiatan tersebut.



“Atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pribadi saya menyambut baik dan apresiasi yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan ini sebagai upaya kita untuk memantapkan kinerja seluruh jajaran PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung,” kata Fatoni.

Menurutnya, kegiatan kali ini merupakan rapat tahunan yang berisi pertanggungjawaban dari pihak Bank Sumsel Babel di hadapan para pemegang sahamnya.

“Berdasarkan Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan diselenggarakan setiap tahun setelah selesainya pemeriksaan Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap laporan keuangan Bank Sumsel Babel,” jelas Fatoni.

Fatoni juga membeberkan sejumlah keberhasilan yang telah dicapai oleh Bank Sumsel Babel dapat lebih ditingkatkan di masa mendatang. Oleh karena itu, dirinya mengapresiasi dan memberikan penghargaan kepada pengurus yang telah bekerja keras demi kemajuan Bank Sumsel Babel.

“Perlu saya sampaikan dalam kesempatan ini, tentunya kita semua berharap agar Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Tahun Buku 2023 ini dapat berjalan dengan lancar dan tertib serta dapat meningkatkan kualitas kinerja dan dapat menjadikan PT Bank Pambangu-

nan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung menjadi Bank yang sehat sesuai dengan Standar Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” jelas Fatoni.

Fatoni berharap melalui kegiatan ini, Bank Sumsel Babel dapat terus meningkatkan kinerja. Hal ini tentunya sejalan dengan sejumlah target yang telah disusun guna meningkatkan kualitas manajemennya.

“Kedepan kami berharap ini bisa menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Pemimpin Divisi Sekretaris Perusahaan Bank Sumsel Babel, Moch Robi Hakim, mengatakan pelaksanaan RUPS tahun 2023 berjalan lancar dan ada sejumlah strategi yang lebih diperdalam.

“Dan ada masukan yang positif dari seluruh pemegang saham untuk Bank Sumsel Babel keseluruhannya, masukan itu menjadi hal yang berharga bagi Bank Sumsel Babel ke depan terkait beberapa kinerja Bank Sumsel Babel,”katanya.

Robi juga menekankan, masukan-masukan tersebut menjadi hal yang luar biasa penting bagi Bank Sumsel Babel ke depannya, terutama terkait dengan peningkatan kinerja dan pengembangan yang lebih besar.

Menurut Robi, rapat ini menjadi momentum penting untuk merumuskan dan memvalidasi strategi pertumbuhan berkelanjutan. Selain itu, guna memperkuat pondasi untuk ekspansi lebih lanjut yang didasarkan pada peningkatan kinerja selama tahun sebelumnya.

Adapun, selama 2023, Bank Sumsel

Babel memperoleh pencapaian kinerja yang mengesankan. Dengan total aset naik sebesar 8,80 persen dari tahun sebelumnya (yoy), Bank Sumsel Babel menunjukkan tak hanya kemampuan mengelola keberlanjutan, tetapi juga potensi pertumbuhan yang signifikan.

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mencapai Rp27,13 triliun mencerminkan kepercayaan yang terus meningkat dari para nasabah, serta peningkatan kapabilitas dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya secara efisien.

Sebagai wujud komitmen tinggi dalam mendukung sektor ekonomi lokal, terutama usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Bank Sumsel Babel berhasil menyalurkan kredit dengan kenaikan secara signifikan sebesar 13,35 persen.

Laba sebelum pajak juga menunjukkan peningkatan luar biasa, yaitu sebesar Rp760,503 miliar atau naik 8,40 persen. Ini merupakan bukti bahwa manajemen efisiensi, inovasi produk, dan pelayanan prima memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan para pelanggan.

Kesuksesan Bank Sumsel Babel selama 2023 adalah hasil dari strategi pertumbuhan jangka panjang yang berfokus pada inovasi dan peningkatan efisiensi.

Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin, pun menunjukkan optimisme tinggi dalam penyelenggaraan RUPS kali ini.

“Kami memaksimalkan kesempatan ini untuk berdiskusi dan merumuskan rencana strategis berikutnya bersama para pemegang saham. Dengan momentum yang kuat ini, kami yakin bahwa Bank Sumsel Babel akan terus menunjukkan kinerja yang positif dan menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan,” terangnya.

Dalam kegiatan ini turut hadir sejumlah pejabat, di antaranya Penjabat Gubernur Bangka Belitung, Safrizal Zakaria Ali; Komisaris Utama Bank Sumsel Babel, Eddy Junaidy; Direktur Utama Bank Sumsel Babel, Achmad Syamsudin; Komisaris Independen Bank Sumsel Babel, Komisaris Non Independen Bank Sumsel Babel dan lainnya. Kemudian, hadir juga bupati/wali kota se-Sumsel dan Bangka Belitung. ● RDO



“Sebenarnya setiap Pilpres dan Pemilu sering terjadi politik bansos, namun tidak memungkir di tahun 2024 ini luar biasa sangat tinggi”

Bagindo Togar

POLITIK BANSOS SATU PUTARAN BERIMBAS BERAS MAHAL

Selain efek politik yang belum selesai hingga sekarang, Pemilu 2024 ini juga menyisakan masalah ekonomi cukup pelik. Melonjaknya bahan pokok membuat ekonomi masyarakat mengalami hambatan.

Melonjaknya harga beras di pasaran di hampir sebagian besar daerah di Indonesia menjadi perhatian publik bahkan sempat tembus ke angka Rp 15.000 per kilogram di berbagai pasar. Hal itu diduga kebijakan penggunaan cadangan beras pemerintah (CBP) yang digunakan untuk politik bansos Pilpres 2024 putaran pertama.

Hasil kajian pengamat ekonomi dan pengamat politik menilai Bansos beras sebenarnya bisa dibagikan kapanpun tidak harus digunakan pada saat Pilpres 2024. Kondisi itu membuat bansos beras menjadi komoditas politik atau adanya politik bansos sehingga berdampak kepada naiknya beras di seluruh Indonesia.

“Sebenarnya setiap Pilpres dan Pemilu sering terjadi politik bansos, namun tidak memungkir di tahun 2024 ini luar biasa sangat tinggi. Kondisi ini berdampak beras menjadi mahal dan walaupun ada harganya jadi sangat tinggi untuk dibeli oleh konsumen,” ungkap pengamat politik dari Forum Demokrasi Sriwijaya (Fordes), Bagindo Togar.

Bagindo Togar menyebutkan kenaikan beras karena efek stok beras digunakan jor-joran pada saat Pilpres sehingga permintaan beras tinggi namun stok beras sudah dikeluarkan saat politik. Jadi jelas kenaikan beras disebutkannya efek dari politik bansos saat Pilpres 2024 di putaran pertama.

“Permintaan tinggi tetapi stok habis itu menyebabkan beras jadi naik terpaksa harus impor dari beras luar. Kalau mau begitu bisa-bisa hutang lagi makanya dampaknya beras jadi mahal karena stoknya kosong permintaannya banyak,” ungkapnya.

Diakuinya untuk politik kedepannya situasi seperti ini sulit untuk dihilangkan, sebab untuk menghentikannya harus memiliki kekuasaan tertinggi. Namun kalau penguasa sendiri melakukannya untuk kepentingan politik bagaimana fenom-

ena tersebut bisa hilang.

“Memiliki kekuasaan namun kita tidak ada kepentingan politik baru bisa dihentikan oleh pemilik kekuasaan tersebut. Namun kalau sekarang yang menggunakan kebijakan itu pemilik kekuasaan tentunya kondisi ini tidak akan bisa dihentikan terus berlanjut sampai kapanpun,” pungkasnya.

Sementara Wakil Ketua DPW PKB Sumsel Momon Wahyudi menjelaskan, pernah melihat bingkisan bansos beras berwarna biru seharusnya bingkisan bansos dari pemerintah biasanya berwarna merah putih. Melihat itu jelas bansos digunakan untuk kepentingan politik menjadi wajar kalau bansos dikeluarkan jor-joran berdampak stok beras terpakai.

“Bansos dari pemerintah setau saya bungkusnya warna merah putih tapi saya pernah lihat di televisi bingkisan bansos warna biru mirip warna baju pemenang salah satu paslon. Dari sana saja sudah jelas peruntukannya,” ujarinya.

Menurutnya bansos berupa beras sangat empuk digunakan untuk menarik suara rakyat karena beras kebutuhan sehari-hari yang memang menjadi kebutuhan hidup. Namun pemerintah memiliki otoritas untuk mengeluarkan bansos atau wewenang yang tidak bisa dilawan oleh partai politik lainnya.

“Siapa pun yang memiliki kekuasaan memiliki wewenang untuk itu apalagi bansos sangat dibutuhkan rakyat. Bukan hanya beras apapun itu bisa digunakan seperti minyak, telur dan sebagainya,” jelasnya.

Pandangan sama disampaikan kader Partai PDI Perjuangan Tun Teja yang menyebutkan dalam politik seharusnya menggunakan adu

strategi dan adu prestasi bukan menggunakan bansos. Terlebih lagi efek kenaikan bansos sekarang sangat membuat rakyat menderita, namun tidak menguntungkan untuk para petani.

“Petani juga tidak berdampak karena semua beras petani sudah diborong para tengkulak mereka yang sekarang memainkan harga beras. Sekarang siapa yang menderita rakyat apa lagi mau bulan puasa,” kata dia.

Tun Teja berkata saat Jokowi mencalonkan diri sebagai Presiden di Pilpres kedua kalinya semua ini tidak pernah terjadi.

Namun dia sendiri terkejut kenapa saat anaknya Gibran Rakabuming Raka mencalonkan diri sebagai Cawapres mendampingi Prabowo Subianto sebagai Capres, tiba-tiba kader partai moncong putih itu menggunakan bansos.

“Jokowi di Pilpres pertamanya dan kemudian saat kembali mencalonkan diri di Pilpres keduanya tidak menggunakan bansos. Jelas karena saat itu yang mengurusnya PDI Perjuangan Jokowi hanya duduk manis tidak menggunakan bansos tetap menang. Kenapa sekarang bansos digunakan, karena Jokowi sudah terpisah dari PDI Perjuangan jadi bebas menggunakan politik tidak beretika seperti itu kalau masih bersama PDI Perjuangan tidak akan berani dengan Ibu Megawati,” tuturnya.

Kondisi ini seharusnya disadari oleh semua rakyat memberikan suara karena diberikan bansos itu salah, Tun Teja menyebutkan bansos dibeli menggunakan uang bajak atau uang rakyat.

Lalu digunakan untuk

mengambil simpatik suara rakyat seperti suap. Baginya bansos juga sebagai bentuk politik uang namun yang digunakan adalah uang rakyat itu sendiri.

“Kenapa rakyat tidak sadar kalau bansos pakai uang pribadi enak ini bansos dari uang rakyat diberikan untuk menyuap rakyat juga,” pungkasnya.

Pengamat Ekonomi Sumatera Selatan (Sumsel) Yan Sulistyو menyebutkan kenaikan beras memang disebabkan kelangkaan beras akibat politik bansos. Namun efek fundamental juga disebabkan adanya mafia beras yang ikut terlibat memanfaatkan momentum tersebut.

“Kalau kata saya kenaikan harga beras juga disebabkan adanya mafia yang menimbun beras! Karena stok beras berkurang mereka memanfaatkan momen untuk menaikkan harga dengan menimbun beras agar jadi langkah dan harganya naik,” jelasnya.

Yan menilai kondisi ini digunakan mafia juga untuk menekan kebutuhan konsumen khususnya di jelang ibadah puasa dan lebaran. Konsumen yang membutuhkan beras untuk ibadah puasa pastinya akan tetap membeli harga beras walaupun harganya mahal.

“Kenaikan harga sekarang sudah gila-gilaan dari harga normal Rp 13.000 per kilogram, sekarang sudah mencapai Rp 15.000 ada yang Rp 18.000. Bahkan di Kalimantan harga beras ada yang Rp 80.000 sampai Rp 100.000. Saya yakin di Sumsel dan Palembang saat puasa nanti harga beras bisa sampai Rp15.000 dan Rp16.000,” ungkapnya.

Dijelaskannya kondisi ini disebutkan hampir sama saat naiknya minyak sayur karena efek dari mafia yang menimbun minyak sayur. Mafia itu disebutkan adalah pemilik modal yang membeli semua stok beras yang ada dan menimbunnya ditahan sampai kebutuhan konsumen untuk membeli tinggi.

“Makanya keberadaan beras sempat hilang di pasaran karena ditimbun dan dikeluarkan kalau permintaannya tinggi ini sama seperti minyak sayur kemarin. Para pemilik modal merupakan mafia-mafia beras yang sekarang memainkan peran ini, saya harap satgas pangan dan para kepolisian segera bertindak untuk mencari penimbunan beras. Kalau dibiarkan berbahaya beras akan hilang dan muncul dengan harga yang semakin tinggi,” pungkasnya.

•RDR



“Banyak sekali kejanggalan kita temukan di Sirekap dan memberi informasi menyesatkan. Ini bentuk dari kecurangan terbuka dari penyelenggara Pemilu. Kemudian Parpol juga tidak terbuka”

Amrah Muslimin



PENYELENGGARA DAN PARPOL TIDAK TERBUKA, KECURANGAN MERAJALELA

Konflik terkait proses penghitungan suara masih terjadi bahkan terjadi di banyak daerah. Aksi saling mencuri suara, penggelembungan, kecurangan penyelenggara Pemilu serta permainan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) masih terus terjadi.

Upaya Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperbaiki sistem Pemilu sepertinya tidak berimbas apa-apa. Bahkan sistem penghitungan suara Sirekap malah membuat masalah baru karena dengan mudah dikutak-katik siapa saja.

Mantan Ketua KPU Sumsel, Amrah Muslimin mengungkapkan ada banyak kecurangan yang terjadi di Pemilu 2024 ini mulai dari penggelembungan suara, penambahan suara di TPS, kecurangan yang dilakukan penyelenggara Pemilu, bahkan terjadi aksi saling lapor antara sesama Caleg di satu partai.

Salah satu penyebabnya adalah akses C1 dipersulit. Tidak semua caleg bisa mendapatkan akses C1 di Pemilu 2024 ini karena dikuasai Parpol. Kemudian adanya penghitungan suara Sirekap yang malah menyesatkan.

“Banyak sekali kejanggalan kita temukan di Sirekap dan memberi informasi menyesatkan. Ini bentuk dari kecurangan terbuka dari penyelenggara Pemilu. Kemudian Parpol juga tidak terbuka. Akses C1 hanya dikuasai ketua, petahana atau orang yang punya kedudukan. Sehingga penggelembungan suara sangat terbuka terjadi,” ujar Amrah.

Pelaksanaan Pemilu tanggal 14 Februari menjadi gambaran kinerja penyelenggara Pemilu untuk menghadapi Pemilu yang konfliknya diprediksi lebih besar lagi. Terjadi banyak tekanan ke penyelenggara Pemilu mulai dari tingkat bawah hingga KPU.

Amrah mengungkapkan, ada beberapa penyebab mengapa kecurangan masih terus terjadi di Pemilu Indonesia. Salah satunya adalah karena mahal biaya politik yang dikeluarkan para Caleg

untuk duduk di kursi dewan.

Melihatnya sederhana saja, untuk Kota Palembang misalnya dari ratusan Caleg ada sekitar 25 persen yang menghabiskan dana lebih dari Rp 2 miliar. Dari jumlah itu hanya sebagian kecil yang berhasil sementara dana yang dikeluarkan sangat besar.

“Orang gagal tentu akan mencari jalan alternatif baik salah atau benar. Salah satunya melakukan penggelembungan suara, melibatkan oknum penyelenggara Pemilu dengan iming-iming yang besar. Mereka yang kalah tentu akan melakukan segala cara karena uang yang dikeluarkan sudah sangat besar,” ujarnya.

Padahal sudah diketahui sebelumnya, peluang untuk menang di legislatif itu sangat kecil yakni sekitar 6 persen saja.

Di Pemilu 2024 ini ungkapnya, Parpol tidak terbuka terhadap blanko C1. Selain itu saksi yang ditugaskan harusnya atas nama Parpol namun malah dimanfaatkan para sebagian Caleg saja.

“Sehingga tidak heran kalau sesama Caleg dalam satu Parpol melaporkan pencurian suara. Bukan hanya di Palembang

saja tapi ada juga daerah lain di Indonesia karena memang tidak transparan. Untuk itu penyelenggara Pemilu harus menginstruksikan agar akses C1 bisa dibuka oleh semua Caleg,” ungkap Amrah.

Sementara pembina Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BP2SS), Sofhuan Yusfiansyah mengungkapkan, ada banyak dugaan pelanggaran yang dilakukan penyelenggara Pemilu baik dari Bawaslu, KPU, PPK, PPS, Panwascam, dan KPPS. Bahkan oknum Caleg juga banyak melakukan hal yang sama.

“Untuk itu kami mendesak agar semua rekomendasi Bawaslu untuk ditindaklanjuti dengan benar oleh KPU dan meminta agar menjadikan temuan semua pelanggaran tersebut menjadi sebuah pelanggaran kode etik bagi PPK, KPU kota/kabupaten, dan KPU Provinsi Sumsel,” terang aktivis ini.

BPP2SS juga meminta kepada Ketua Bawaslu Sumsel untuk mengeluarkan rekomendasi kepada ketua KPU Sumsel untuk melaksanakan PSU (Pemungutan Suara Ulang) DPRD Provinsi dan DPR RI di seluruh kecamatan se Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Komering Ilir dikarenakan telah terjadi dugaan yang kuat manipulasi suara di Kecamatan Mesuji Makmur Kabupaten OKI dalam rekapitulasi

“Kami juga mendesak Kapolda Sumsel untuk memerintahkan semua jajarannya baik Polda, Polres Kota/Kabupaten, dan Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kepolisian untuk menindak tegas dugaan tindak pidana Pemilu sampai ke meja hijau,”

tegas Sofhuan.

Hasil temuan BP2SS, terjadi dugaan manipulasi suara yang dilakukan oknum PPK Kecamatan Mesuji Makmur yang telah terbukti adanya manipulasi suara kepada salah satu caleg. Temuan ini sudah mereka laporkan ke Gakkumdu Sumsel tanggal 5 Maret lalu.

BP2SS juga menyikapi peristiwa pengamanan dua oknum komisioner OKU yang dibawa ke Polres OKU yang t menggemparkan dunia Kepemiluan di Indonesia.

“Untuk itu demi kepastian hukum untuk diusut tuntas semua pelaku yang terlibat dan mendesak kapolda mengambil alih kasus dugaan tindak pidana oknum komisioner Bawaslu OKU. BP2SS juga melayangkan surat resmi dugaan tindak pidana pencucian uang dan korupsi yang diduga dilakukan oknum Komisioner Bawaslu OKU,” tegasnya.

Pengamat politik Sumsel Bagindo Togar mengkritisi kinerja penyelenggara pemilu Bawaslu dan KPU karena hingga saat ini tidak bisa mencegah dan tidak dapat berbuat apa-apa dengan fenomena yang terjadi.

“Dengan terjadi dan maraknya politik uang penyelenggara pemilu tidak bisa berbuat apa-apa dan tidak melakukan apapun apalagi di kabupaten/kota,” tegas Togar.

Menurut Togar penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu ini hanya mengamankan posisi jabatan mereka saja, berbuat secara standar saja nyaris tidak ada, apalagi upaya-upaya terlihat aktif.

“Saya sempat kritik kejadian yang terjadi di OKU Selatan, Muratara bahkan Empat Lawang juga ada praktik-praktik kotor. Penyelenggara kita ini cenderung pasif.

“Bahkan mereka berusaha mencari peluang dari pelaksanaan Pileg, maaf, seolah-olah untuk menjadi lahan, untuk mereka meningkatkan pendapatan mereka dari para Caleg,” terang pengamat yang cukup dikenal di Sumsel ini.

Terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) menurut Togar, PSU tidak boleh dilaksanakan sebelum pemilihan susulan karena PSU itu merupakan hak Mahkamah Konstitusi (MK). Sehingga tidak ada pemungutan suara ulang tanpa asa keputusan MK.

“Tapi untuk penghitungan ulang dan atau pemilihan lanjutan boleh, ketika ada putusan dari MK baru bisa dilaksanakan PSU,” tegas Togar.

●RDR





“Politik uang itu sangat dilarang berdosa. Nabi Muhammad SAW mengatakan bagi orang yang menerima suap dan memberi suap keduanya salah dan berdosa dihadapan Allah SWT langsung masuk neraka”

Ahmad Almuhajir

JUAL BELI SUARA DI POLITIK GANJARANNYA NERAKA

Politik bukan hal tabu dalam agama bahkan dianjurkan karena akan menentukan masa depan bangsa. Namun dalam berpolitik juga ada etika yang harus dijaga, diantaranya tidak dibolehkan melakukan jual beli suara, suap menyuap serta melakukan tindakan tidak terpuji lainnya.

Nabi Muhammad SAW dalam memperkenalkan agama Islam menggunakan politik sebagai alat untuk mencapai tujuannya. Namun di era sekarang politik lebih diperuntukkan mendapatkan kekuasaan dan uang sebagai alat utama untuk melancarkan tujuan tersebut.

Menurut pendapat para ulama di Sumatera Selatan (Sumsel) politik di dalam Islam diperbolehkan, namun menggunakan uang seperti jual beli suara diharamkan dalam Islam bahkan semua agama juga melarangnya.

Para ulama menyebutkan jual beli suara di politik bisa menarik pemberi dan penerima uang ke dalam api neraka karena telah melakukan tindakan merugikan orang lain dan merusak demokrasi.

Ulama Sumsel yang juga pendiri Pesantren Kiai Marogan KH Masagus Ahmad Fauzan Yayan SQ mengatakan, di dalam Islam politik itu adalah kegiatan positif dan diperbolehkan. Namun dia menegaskan politik uang itu sangat ditentang Islam karena berdampak kepada dosa besar.

“Berpolitik di Islam boleh asalkan jangan menggunakan uang karena dosa besar! Pelaku memberikan uang dan penerima uang sama-sama dosan dan bisa masuk neraka,” kata dia.

Menurut Cicit Kiai Marogan seorang ulama penyebar Islam di Kota Palembang yang lahir pada tahun 1802 dan tahun 1901 ini, politik di matanya sekarang cenderung berkiblat kepada politik uang.

Kesadaran masyarakat memilih pemimpin karena berdasarkan uang sangat salah dan berbeda terbalik dalam konsep politik yang diperbolehkan dalam Islam.

“Pemimpin yang dipilih menggunakan politik uang akan menimbulkan indikasi KKN kedepannya, pasti uang yang banyak dipakai ingin mereka dapatkan lagi dengan jumlah besar. Kita tahu sendiri Pemilu secara langsung mengeluarkan dana yang sangat besar bagi orang-orang yang menggunakan uang demi menang,” jelasnya.

Dalam Islam disebutkannya sangat diperbolehkan berpolitik untuk memimpin kelompok dalam sebuah wilayah dengan konsep kebaikan. Nabi Muhammad SAW dijelas-
kannya berpolitik untuk memimpin sebuah

wilayah di Madinah sekarang adalah kota Arab Saudi mengumpulkan semua kelompok untuk mengajarkan syariat Islam.

Nabi Muhammad SAW juga berpolitik dia mengumpulkan sebuah kelompok di Madinah baik itu dari kaum Nasrani, kaum Yahudi, Islam dan beragam suku. Kelompok organisasi yang didirikan oleh Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai masyarakat Madani.

“Dari sana jelas di Islam berpolitik itu diperbolehkan dengan tujuan untuk sesuatu yang positif dan menjalankannya dengan tujuan mencari ridho Allah. Misalnya berpolitik untuk menjadi pemimpin yang baik agar bisa mensejahterakan rakyat itu diperbolehkan sekali,” ungkapnya.

Sementara itu ulama Sumsel Ustadz Ahmad Al Muhajir mengatakan, selama politik itu menerapkan politik yang baik jujur dan tidak melewati batas-batasan agama itu tidak dilarang. Politik dinilainya bertujuan untuk mengembangkan suatu tempat suatu kelompok, wilayah bahkan negara agar lebih baik lagi.

“Berpolitik untuk menciptakan wilayah dan kelompok untuk lebih baik lagi diperbolehkan dalam agama,” jelasnya singkat.

Dijelaskannya nabi Muhammad SAW berpolitik untuk membesarkan syiar Islam dengan membuat kelompok tertentu.

Nabi Muhammad SAW menurutnya melakukan itu agar bisa mendekatkan dirinya dengan raja-raja besar demi bisa memasukkan ajaran syiar-syiar islam kepada para raja-raja.

“Kalau berpolitik dan memimpin kelompok tertentu nabi Muhammad SAW bisa mendekatkan diri kepada raja-raja yang non muslim biar bisa mengajarkan syiar Islam ke wilayah mereka. Tentunya nabi Muhammad SAW mendekatkan diri dengan pola santun bersilaturahmi masuk ke wilayah yang belum beriman kepada Allah SWT. Artinya jelas disini berpolitik di Islam itu diperbolehkan asal niat dan tujuannya demi beriman kepada Allah SWT,” jelasnya.

Namun dia berkata politik di era sekarang sangat berbanding terbalik dengan tujuan berpolitik dalam ajaran Islam, politik lebih mengutamakan keua-

saan dan mendapatkan kesenangan duniawi semata.

Terlebih lagi memanfaatkan kemiskinan rakyat dengan memberikan uang dalam politik sering digunakan dalam setiap Pemilu.

“Politik menggunakan uang sangat bertentangan dengan agama Islam terlebih lagi para calon pemimpin menggunakan faktor ekonomi rakyat

untuk mendapatkan suara. Seharusnya jangan menjual iman kita demi uang marilah kita jalankan politik pintar dan bijaksana agar mendapatkan pemimpin yang amanah,” tuturnya.

Dia juga politik menggunakan uang di era sekarang sangat bertentangan ajaran Islam bisa berujung kepada dosa besar.

sar. Dalam ajaran Islam ustadz Al Muhajir juga menyebutkan bagi orang yang memberikan suap dan menerima suap mendapatkan ganjaran dosa besar.

“Politik uang itu sangat dilarang berdosa. Nabi Muhammad SAW mengatakan bagi orang yang menerima suap dan memberi suap keduanya salah dan berdosa dihadapan Allah SWT langsung masuk neraka. Itu kata Al-Quran yang diatur dalam surat Al-Baqarah” tegasnya.

Ditambahkannya terakhir nabi Muhammad SAW berpolitik juga demi keselamatan semua umat walaupun non Islam di era itu. Nabi Muhammad SAW berpolitik juga melahirkan perjanjian politik dikenal dengan Piagam Madinah disusun olehnya sebagai perjanjian formal antara dirinya dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yatsrib dikenal kemudian bernama Madinah.

“Konstitusi itu dibuat nabi untuk mengakhiri pertempuran sengit antara Bani Aus dan Bani Khazraj di Madinah menjaga perdamaian dan kerjasama. Jelas disini bukan hanya untuk Islam tetapi juga non Islam agar kedamaian berjalan selama mereka tidak memerangi umat Islam di era tersebut,” pungkasnya. ●RDR



“Dari pertanyaan terbuka (secara spontanitas), responden memilih nama Bupati Muba yang tinggi adalah Apriyadi (48,8 persen). Nama-nama calon bupati lainnya masih berada di bawah 7 persen”

Arianto



PENJABAT DAERAH PUNYA KARPET MERAH

Meski perhelatan pemilihan kepala daerah masih beberapa bulan lagi namun riak-riak persaingan mulai muncul ke permukaan. Dari banyaknya nama yang muncul sebagai kandidat, posisi penjabat kepala daerah punya peluang yang lebih besar dari lainnya.

Beberapa lembaga survei menyebut, kepala daerah punya keuntungan yang lebih besar dari para pesaing lainnya. Di Sumatera Selatan, dua nama penjabat daerah masuk daftar orang punya peluang besar di Pilkada Sumatera Selatan.

Mereka adalah Apriyadi Mahmud yang saat ini menjabat sebagai Penjabat Bupati Musi Banyuasin (Muba) dan Ratu Dewa yang sekarang menyandang sebagai Penjabat Walikota Palembang.

Dari hasil kajian Lembaga Kajian Politik Independen (LKPI) menyebut, Apriyadi dan Ratu Dewa peluang besar untuk menang di Pilkada 2024.

Berdasarkan hasil survei LKPI, elektabilitas Pj Bupati Muba, Apriyadi Mahmud menjadi yang tertinggi dibanding kandidat lain jelang Pilkada 2024. Dia dianggap berhasil memimpin Kabupaten Muba, salah satunya mampu menurunkan angka kemiskinan dan membangun berbagai infrastruktur.

“Dari pertanyaan terbuka (secara spontanitas) responden memilih nama Bupati Muba yang tinggi adalah H Apriyadi (48,8 %). Nama-nama calon bupati lainnya masih berada di bawah 7 persen. Massa yang belum menentukan pilihan 37,3 persen. Secara statistik elektabilitas Apriyadi Mahmud tergolong signifikan,” ungkap Direktur eksekutif LKPI, Arianto.

Dia menambahkan, pada uji simulasi pertanyaan semi terbuka dengan menyodorkan beberapa nama-nama calon Bupati Muba dan responden boleh menjawab di luar nama tersebut. Elektabilitas kandidat doktor ilmu administrasi pemerintahan Unsri ini tetap konsisten berada di urutan pertama.

Termasuk pada uji simulasi tertutup para calon bupati untuk mengetahui tingkat kemandirian pemilihan, elektabilitas mantan Kadis pendidikan Muba ini masih unggul dibandingkan calon-calon bupati lainnya.

Pada uji simulasi

tertutup tiga nama calon bupati yang digadang-gadangkan akan maju di pilkada Muba, dukungan terhadap H Apriyadi mencapai angka 63,7 %.

Dua nama lainnya masih berada di bawah 13 % dan massa yang belum menentukan pilihan 9,2 %. Demikian juga pada uji dua nama calon secara tertutup, elektabilitas H Apriyadi berada di kisaran 69 %-70 %.

“Pada survei bulan Februari 2023, simulasi tiga nama dan dua nama calon bupati menunjukkan dukungan H Apriyadi masih seimbang dengan Beni Hernedi dan Lucianty. Artinya, trend elektabilitas Apriyadi linear dan positif secara statistik. Selain itu, tingkat popularitas dan elektabilitas Apriyadi terus meningkat. Hal ini yang menjadi salah satu faktor utama yang mendorong elektabilitas Apriyadi sehingga unggul signifikan dari calon lainnya,” ungkapnya.

Kuatnya tarikan elektoral Apriyadi Mahmud dilatarbelakangi dengan tingkat kepuasan dari kinerja selama dia memimpin Kabupaten Muba. Masyarakat yang menyatakan sangat puas (8,8 %), puas (71,9 %), tidak puas (12,5 %). Kemudian tidak puas sama sekali (0,6 %) dan tidak tahu (6,2 %).

Apriyadi juga sering sekali menyerap aspirasi warga dengan cara menginap di desa-desa. Hal ini membuat kedekatan secara emosional sangat terjalin baik.

Untuk tingkat kinerja pemda Muba dalam mengatasi masalah-masalah di masyarakat, baik dalam infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, kea-

manan, kebersihan, perizinan terpadu, keagamaan, pengolahan pedagang kaki lima, penataan kota, mengatasi harga kebutuhan pokok, kinerja ASN dan para camat, angka tingkat kepuasan masyarakat berada di kisaran 78 hingga 89 persen.

Salah satu parameter di atas memperlihatkan adanya kinerja peningkatan yang cukup tinggi sehingga apresiasi pemilih menunjukkan kuatnya kenaikan elektabilitas H Apriyadi Mahmud.

Survei LKPI digelar akhir Februari 2024 dengan melibatkan 820 responden (82 desa dan kelurahan) di seluruh desa kabupaten Muba secara proporsional. Metode penarikan sampel multistage random sampling dengan margin of error +/-3,5 % dan tingkat kepercayaan 95 %.

Ratu Dewa Urutan Pertama

LKPI juga mempublikasikan temuan hasil survei terbarunya terkait elektabilitas calon-calon Walikota Palembang.

Elektabilitas Pj Walikota Palembang, Ratu Dewa bertengger di urutan pertama dan unggul signifikan dari semua kompetitor calon walikota Palembang. Naikannya elektabilitas pria yang lebih sering terjun langsung menemui warga ketimbang di kantor ini merupakan salah satu indikator yang kuat untuk maju dalam kompetisi pilkada serentak yang akan digelar 24 November 2024.

Arianto mengatakan, elektabilitas Ratu Dewa sudah menyalip para kandidat yang

digadang-gadangkan maju pada pilkada Walikota Palembang. Sementara pesaing utama Ratu Dewa untuk saat ini adalah Fitrianti

Agustinda.

Kuatnya tarikan elektoral Ratu Dewa mendominasi mulai dari pertanyaan terbuka (top of mind) sampai dengan uji simulasi beberapa nama calon walikota. Peningkatan elektabilitas Ratu Dewa tidak serta merta muncul begitu saja.

Kerja-kerja Ratu Dewa dan jajarannya dalam memimpin gerbong Pemkot Palembang untuk bekerja dan melayani masyarakat serta cepat tanggap dalam permasalahan yang muncul pada akhirnya tercermin dengan angka elektabilitas yang naik signifikan.

Pada spontanitas jawaban pemilih (pertanyaan terbuka), temuan survei Ratu Dewa (35,8 %), Fitrianti Agustinda (16,9 %).

Kemudian ada nama Ketua DPC Partai Demokrat Palembang, Yudha Pratomo (2,5 %), Nasrun Umar (1,4 %), Charma Afrianto (1 %).

Ketua Partai Golkar Palembang, M Hidayat (0,5 %), Mgs Syaiful Fadli (0,4 %), Zaitun Mawardi Yahya (0,1%) serta politisi PDIP, Yulian Gunhar (0,1 %). Ada massa yang belum menentukan pilihan (41,3 %).

Untuk uji simulasi semi terbuka dengan menyodorkan dua puluh satu nama calon walikota, hasilnya Ratu Dewa (48,4 %), Fitrianti Agustinda (25,3 %), Nasrun Umar (2,5 %), Yudha Pratomo (2,6 %), Akbar Alfaro (2 %), Charma Afrianto (1,2 %), Ahmad Zulinto (1,1 %), Mgs Syaiful Fadli (0,9 %), Zaitun Mawardi Yahya (0,7 %), M Hidayat (0,6 %), Basyarudin Akhmad (0,5 %) dan nama calon lainnya masih di bawah 0,5 % serta massa yang belum menentukan pilihan 12,7 %.

“Ada konsistensi elektabilitas Ratu Dewa yang kuat naiknya pada uji simulasi calon. Secara statistik, elektabilitas Ratu Dewa sudah sangat layak maju sebagai calon walikota Palembang mendatang,” ungkap Arianto.

Bahkan uji simulasi tiga nama calon Ratu Dewa (54,1 %), Fitrianti Agustinda (27,6 %), Nasrun Umar (3,8 %) dan massa yang belum menentukan pilihan (14,5 %).

Latar belakang pemilih menjatuhkan pilihannya pada Ratu Dewa ada tiga komponen yaitu yakin bisa membawa perubahan kota Palembang lebih baik, sudah ada bukti hasil kerja nyata, orangnya perhatian pada rakyat dan berpengalaman di pemerintahan. Skors angka tersebut berada di atas tujuh puluh persen.

“Faktor tingkat kepuasan kinerja Ratu Dewa selama menjabat Pj Walikota juga baik. Responden yang menyatakan sangat puas (8 %), puas (74,6 %), tidak puas (6 %), tidak puas sama sekali (0,9 %) dan tidak tahu/tidak jawab (10,5 %). Yang menarik adalah tingkat keterkenalan (popularitas) dan kesukaan (akseptabilitas) Ratu Dewa masih belum maksimal. Popularitas Ratu Dewa (88 %) dan akseptabilitas (98 %). •RDR





Kalau mau jujur saya tidak mau terikat dengan siapapun. Profesi advokat itu dia bebas, mandiri dan independen”

Zeldi Dwitama

TIDAK MAU JADI BUDAK PERUSAHAAN

Menjadi seorang kader partai tidak harus fokus menjadi calon legislatif atau seorang politisi. Banyak hal yang bisa dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada partai politik tanpa harus menjadi seorang politisi di legislatif.

Hal ini pula yang dilakukan Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Sumatera Selatan (Sumsel) Zeldi Dwitama, SH. Di Pemilu 2024 ini dia tidak mencalonkan diri sebagai Caleg namun termasuk orang yang paling sibuk untuk melakukan advokasi di berbagai daerah.

Zeldi berpendapat, menjadi advokat karena ada alasan sakral yang sangat pribadi untuknya. Profesi advokat dianggapnya sesuai sesuai dengan karakter yang anti bekerja dibawah tekanan perusahaan alias tidak ingin bekerja sebagai budak perusahaan.

“Saya tidak suka kerja kalau ikut dengan manusia atau dengan sebuah perusahaan. Karena lebih baik bekerja secara independen,” kata dia.

Menurut alumni STIHPADA angkatan 2013 menjelaskan alasan itulah membuatnya memilih kampus terfokus kepada ilmu hukum. Tentunya bertujuan untuk memilih karirnya nanti bekerja sebagai advokat di kemudian hari. Baginya advokat adalah pekerjaan yang bebas dan tidak terikat dengan sebuah company.

“Alhasil sekarang saya menjadi advokat. Kalau mau jujur saya tidak mau terikat dengan siapapun. Profesi advokat itu dia bebas, mandiri dan independen,” ucap pria kelahiran 22 September 1995 sekarang berumur 29 tahun ini.

Sehari-hari dia bekerja sebagai advokat di wilayah Sumsel dan Palembang melakukan advokasi spesialis perkara yang ditangani kasus pidana, perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) terkait Parpol.

Dengan kerja keras sebagai advokat pun Zeldi Dwitama yang telah menikah dengan Ayu Maulina dan memiliki satu anak bernama Shaqueena Nadlyne Zelay baru lahir saat Pilpres berlangsung.

“Kasus yang sering saya kerjakan itu pidana dan perdata. Alhamdulillah sekarang saya sudah menikah dan baru saja mendapatkan buah hati,” ucapnya bahagia.

Selain bekerja sebagai advokat Zeldi Dwitama juga terus menjaga kondisi tubuhnya dari aktifitas padat dengan terus berolahraga. Dia memilih olahraga futsal dan berenang untuk menjaga kebugaran fisiknya.

“Selepas bekerja saya juga tidak lupa olahraga biasanya futsal dan berenang. Olahraga juga sudah jadi bagian hobi saya bukan sekedar untuk menjaga kesehatan tubuh saja,” ucapnya.

Sementara itu saat Pilpres 2024

menjadi advokat partai besar, bahkan menjadi Wakil Ketua Badan Bantuan Hukum Advokasi Rakyat (BBHAR) DPD PDI Perjuangan Sumsel.

Zeldi Dwitama, SH melakukan advokasi berbagai kasus yang dialami oleh partai PDI Perjuangan terlebih lagi adanya kecurangan yang dialami oleh paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

Dia menyebut banyaknya kasus pelanggaran terjadi di daerah karena banyak kepala daerah atau aparatur desa diberikan instruksi untuk memilih salah satu calon tertentu.

Hal itu didapatkannya melalui laporan dari kader, simpatisan dan masyarakat di Sumsel.

“Kecurangan di data kami 40 laporan dari simpatisan kader dan masyarakat yang paling banyak di daerah kabupaten itu di Ogan Ilir sekitar angka 10. Kebanyakan polanya menggunakan aparatur desa untuk memilih salah satu paslon iming-iming saat pencoblosan akan diberikan sembako. Seharusnya mereka sebagai aparatur negara atau ASN itu jelas dilarang untuk berpihak harus netral,” ucapnya.

Dari Pilpres 2024 kemarin sebagai kader PDI Perjuangan dia sangat kecewa dengan Joko Widodo Presiden RI ke-7 notabene tokoh politik dari moncong putih.

Dia menyebut Jokowi sebagai presiden ikut kampanye secara tidak langsung saat Pilpres untuk mendukung nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

“Jokowi walaupun tidak terang-terangan melakukan kampanye dia datang ke Magelang menggunakan mobil kedinasan negara mengacungkan dua jari. Membagikan Bansos dan memanggil warga untuk menyebutkan sila-sila Pancasila tetapi saat menyebut sila ke dua dia mengacungkan tangan dua, apakah itu tidak ikut kampanye,” ungkapnya.

Selain itu dia juga kesal karena Jokowi dinilai tidak mengikuti perintah tegas berupa intrusi harus tegak lurus dari partai PDI Perjuangan.

Menurutnya seharusnya Jokowi seharusnya secara terang-terangan mengembalikan KTA karena tidak menjalankan instruksi partai memenangkan nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di Pilpres 2024 kemarin.

Namun Jokowi seakan-akan melakukan manuver politik dengan main dua kaki yakni di pantai mendukung nomor 03, namun disisi lain mendukung lawan paslon nomor urut 02.

“Sebagai kader PDI Perjuangan kader harus tegak lurus harus ke 03. Namun saat beberapa kali Jokowi ikut pertemuan PDI Perjuangan ketika itu dia tegas berkata mendukung nomor 03 nyatanya dia mendukung anaknya. Jokowi mendapatkan semua kekuasaan karena PDI Perjuangan namun saat menjadi pemimpin dia lupa. Kalau tidak mau ikut perintah partai seharusnya dia mengembalikan KTA tetapi sampai sekarang Jokowi belum keluar dari partai,” pungkas Zeldi.●RDR





SUARA GOLKAR MEROKET JOKOWI JADI KETUA UMUM

Presiden Joko Widodo sudah lama diisukan akan bergabung dengan Partai Golkar karena beberapa manuver yang dilakukannya membuat PDIP tidak senang. Belakangan, muncul kembali isu bahwa mantan Wali Kota Solo itu bakal menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Jokowi secara formal masih merupakan kader PDIP. Namun, realita politik pada Pilpres 2024 menunjukkan kedua belah pihak sudah beda kepentingan. Terlebih, pasca majunya anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Lantas, bola liar isu Jokowi merapat ke Golkar mulai bergulir.

Isu mengenai Jokowi yang akan merapat ke Golkar muncul saat ia memberikan gestur tak biasa dengan memakai dasi kuning saat hendak bertolak ke Jepang dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 16 Desember 2023.

Golkar kemudian membaca hal tersebut sebagai sinyal politik presiden yang nyaman dan akan merapat pada pihaknya. Ketika ada pertanyaan perihal makna dasi tersebut di Bogor pada Selasa, 19 Desember 2023, Jokowi menjawab, nyaman.

Tak lama kemudian, Ketua Umum Partai Golkar gamblang menyatakan Jokowi dengan partainya memiliki hubungan yang sangat dalam.

“Jadi, hubungan (keluarga besar Jokowi) dengan Partai Golkar memang sudah sangat sangat dalam,” kata Airlangga saat menghadiri senam massal rangkaian HUT Golkar ke-59 di Yogyakarta pada Minggu, 24 Desember 2023.

Mesranya hubungan Jokowi dan Golkar sebagai anak kandung Orba sebenarnya sudah tercium lama. Pengamat Yudi Latief menulis dalam sebuah artikel di media nasional, bahwa Jokowi lebih nyaman dengan merapat pada binaan Orba.

Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai, Presiden Jokowi akan dengan mudah merebut kursi nomor satu di Partai Golkar. Hal tersebut karena Jokowi memiliki kedekatan

dengan para politisi senior partai beringin, salah satunya Luhut Binsar Pandjaitan (LBP).

Hari menilai, kedekatan hubungan mereka akan sangat membantu Jokowi jadi Ketua Partai Golkar. Apalagi, Jokowi menaruh kepercayaan yang begitu tinggi kepada LBP di pemerintahan.

“Tentunya keterlibatan dan peran Luhut Binsar Panjaitan (LBP) memperbesar langkah dan mewujudkan Jokowi menjadi Ketua Partai Golkar,” katanya, Senin, 4 Maret 2024.

Tidak hanya membantu, kata Hari, tetapi LBP juga bisa menjadi pelindung bagi mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Dia menduga Jokowi akan menduduki kursi Ketua Partai Golkar asalkan dapat memberikan pengaruhnya terhadap kemenangan salah satu paslon di Pilpres 2024.

“Ada dugaan yang mengatakan bahwa kemenangan TMS (Terstruktur, Sistematis, Masif) pada salah satu paslon capres-cawapres atas arahan Jokowi dan dengan syarat menaikkan suara Golkar,” katanya.

Namun di sisi lain, Jokowi nampaknya tidak bisa memberikan dukungan penuh kepada partai pimpinan Kaesang Pangarep yang juga anak kandungnya yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Politisi senior Partai Golkar, Jusuf Kalla (JK), merespons soal wacanan Jokowi akan gabung dan menjadi ketua partai beringin dengan menyebut, siapapun dapat bergabung dengan Partai Golkar dengan syarat. Kata JK, syarat tersebut harus dipe-

nuhi dan dipatuhi oleh seluruh pihak jika ingin bergabung dengan-

gan Partai Golkar.

“Ya semua orang bisa bergabung ke Golkar, tapi dengan syarat-syarat, bergabung saja boleh, apa yang tidak boleh,” kata JK usai acara Mukhtamar Dewan Masjid Indonesia (DMI) di Hotel Sultan, Jumat, 1 Maret 2024.

JK menjelaskan, jika Jokowi ingin menjadi pengurus Partai Golkar, harus melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam AD/ART. Sementara itu, jika Jokowi ingin menjadi Ketua Umum Partai Golkar, syaratnya harus menjadi pengurus kurang lebih 5 tahun.

Kemudian, Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono, mengatakan, partai yang dipimpin Airlangga Hartarto tersebut memiliki harapan begitu besar agar Jokowi bergabung dengan partainya. “Semoga menjadi kenyataan,” katanya.

Dave mengatakan, Jokowi memiliki segudang pengalaman di pemerintahan. Hal itu terbukti ketika dirinya memimpin Indonesia selama dua periode atau 10 tahun. Dengan Jokowi bergabung dengan Golkar, tentunya bisa memberikan sumbangsih kepada negara dan bangsa untuk ke depannya.

“Kami menyakini, pemikiran dan kemampuan serta bukti keberhasilan memimpin negara selama 10 tahun akan terus menghasilkan karya nyata kepada bangsa dan negara dengan masuk ke dalam Golkar,” jelasnya.

Dave menambahkan, Jokowi dan Partai Golkar memiliki hubungan yang sangat dekat dan harmonis. Itu ditandai dengan kepercayaan Jokowi kepada kader Partai Golkar yang menempati posisi strategis di pemerintahannya selama dua periode ini.

“Golkar menjadi pilar utama kekuatan dalam pemerintahan ini. Kita telah melampaui segala macam kendala dalam sejarah bangsa, dan selalu bangkit dari setiap masalah,” ujarnya.

Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar, Idrus Marham, mengatakan, wacana Jokowi nantinya akan

diputuskan melalui Musyawarah Nasional (Munas). Kendati begitu, tidak menampik posisi ketua umum sejatinya dapat diganti. Namun, harus melalui mekanisme yang berlaku di internal partai tersebut.

“Ini semua bisa dibicarakan. Pengambilan keputusan tertinggi ada di Munas. Jangan kan itu, masalah ketua umum, jangan kan itu, AD/ART saja bisa diubah,” katanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Februari 2024.

Mantan Menteri Sosial itu mengatakan, pembahasan mengenai masa depan dan calon nakhoda Partai Golkar akan dibahas dengan matang di Munas. “Artinya tertinggi betul itu (Munas), bagaimana Golkar ke depan, nasibnya ada di Munas sebagai lembaga tertinggi tertentu,” ujarnya.

Meski begitu, Idrus menyebut, Jokowi harus melewati beberapa tahapan untuk bisa menjadi kader Partai Golkar. Di sisi lain, gabungannya Jokowi ke Partai Golkar tidak akan terwujud dalam waktu dekat ini. Sebab, saat ini masih dalam momentum Pemilu.

“Semua tentu ada pentahapan. Pentahapannya bagaimana? Ini ada momentum politik, kita baru ada pemilu,” imbuhnya.

Idrus menyampaikan, alangkah baiknya Jokowi dengan Partai Golkar untuk melakukan pendekatan terlebih dahulu. Sehingga, nantinya Jokowi sudah mengetahui lebih dalam terkait dengan visi dan misi dari partai yang pernah dipimpin Soeharto tersebut.

“Nah kalau ada di belakang-belakang yang namanya, mungkin masih pacaran-pacaran, orang masih lagi PDKT. Tapi kan tidak perlu itu karena suasana kebatinan sudah dekat kok,” jelasnya.

Idrus menambahkan, yang jelas Partai Golkar akan menerima siapapun yang akan bergabung. Namun, dia mengingatkan bahwa Partai Golkar bukan partai milik keluarga, akan tetapi milik seluruh masyarakat Indonesia.

“Jadi kalau ada yang mau bergabung dengan Golkar, ya, dalam rangka bersama-sama membesarkan Golkar, ya, ini namanya partai go public, bukan milik keluarga, bukan milik satu kelompok, kan bebas-bebas saja,” ujarnya.

Sementara itu, analis politik Citra Institute, Efriza, mengatakan, kemungkinan Presiden Jokowi bergabung dengan Partai Golkar peluangnya yang besar. Namun kemungkinan ini tidak selaras jika Jokowi langsung menjadi ketua umum.

Efriza menilai, peluang Jokowi menjadi ketua Partai Golkar masih sangat kecil. Sebab, banyak politisi senior di Golkar yang ingin menggantikan Airlangga Hartarto.

“Peluang Jokowi menjadi Ketua Umum Partai Golkar amat kecil,” katanya, Senin, 1 Maret 2024.

Efriza mengatakan, Jokowi memang memiliki pengaruh yang besar terhadap Partai Golkar. Hal itu terlihat ketika perolehan suaranya pada Pemilu 2024 ini naik cukup signifikan. ●RDO





“PT itu malah harus dinaikkan. Pemilu 2024 ini PKB usulkan 7 persen. Kenapa? Supaya terjadi proses pelembagaan politik supaya lebih stabil dan produktif”

Syaiful Huda

AMBANG BATAS PARLEMEN HARUSNYA 7 PERSEN

Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengenai ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.

Dalam amar putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan dalam sidang pleno pada Kamis, 29 Februari 2024, Mahkamah meminta DPR mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam UU Pemilu agar lebih rasional.

Putusan MK soal ambang batas parlemen itu mendapat tanggapan dari berbagai pihak, beberapa di antaranya meminta MK juga mengoreksi ambang batas presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen.

Anggota Komisi II DPR Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Guspari Gaus, mengatakan, DPR tentu membuka peluang revisi UU Pemilu, khususnya terkait ambang batas parlemen 4 persen.

“Komisi II DPR akan memutuskan sesuai dengan perintah MK agar keputusan itu sudah bisa diberlakukan di tahun 2029, tapi yang jadi masalah tentu akan kita musyawarahkan lintas fraksi apakah memang 4 persen ini harus direvisi,” ujar Guspari, Selasa, 5 Maret 2024.

Namun, ia tak begitu yakin ambang batas parlemen disepakati di angka 0 persen. Menurutnya, angka yang proporsional di antara 2-3 persen agar tak ada suara yang terbuang.

Sementara itu, Fraksi Partai Nasdem memiliki semangat untuk hadirnya penyederhanaan partai politik di DPR. Mereka mengusulkan ambang batas parlemen sebesar 7

persen. ambang batas parlemen sebesar 7 persen diperlukan untuk benar-benar menyeleksi partai politik yang akan masuk ke DPR.

“Bahwa itu ya kan ini diskursus, bahwa masing-masing punya pendapat. Kalau kita malah justru PT itu kalau bisa tujuh persen,” ujar anggota DPR Fraksi Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto.

Idealnya, harus terdapat sembilan fraksi di DPR yang dapat menyampaikan aspirasi berbagai kelompok masyarakat. Jangan sampai ada banyak partai politik, tetapi memiliki ideologi yang sama dan justru membuat suaranya semakin kecil.

“Karena kan kalau kita banyaknya partai, bukan berarti tidak partisipatif kan. Bayangkan kalau partai tadi bergabung dengan partai-partai yang se-platform, seideologi, segagasan juga sama, saya kira jauh lebih baik,” ujar Sugeng.

“Kita terlalu banyak partai politik, malah semakin banyak suara yang tidak tertampung akhirnya,” sambung Ketua DPP Partai Nasdem itu.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaiful Huda, juga berpendapat penghapusan ambang batas parlemen 4 persen tidak tepat. Menurutnya, angka PT mestinya lebih tinggi dari itu untuk menghindari praktek pragmatisme politik.

Dia menuturkan, praktek pragmatisme itu bisa dilihat dari mudahnya pemodal untuk membentuk partai politik. Padahal secara politis tidak memiliki kapasitas dan rekam jejak yang cukup untuk melenggang di kursi parlemen.

Huda pun mengaku tidak setuju jika partai-partai kecil dengan mudahnya masuk ke Senayan. Hal itu bahkan dianggapnya sebagai cara yang liberal.

Huda berpendapat persentase PT semestinya justru lebih tinggi dari 4 persen. Secara gamblang, angka PT lebih baik dinaikkan menjadi 7 persen.

“Ini agenda PKB dari dulu. PT itu malah harus dinaikkan. Pemilu 2024 ini PKB usulkan 7 persen. Kenapa? Supaya terjadi proses pelembagaan politik supaya lebih stabil dan produktif,” ungkapnya.

Huda menyebut, jika kondisinya seperti ini, maka politik Indonesia menjadi tidak produktif. Jumlah partai yang terlalu banyak di parlemen akan membuat perpolitikan menjadi tidak kondusif.

Pusat Studi Hukum Konstitusi Universi-

tas Islam Indonesia (PSHK UII) menyebut penghapusan ambang batas parlemen 4 persen layaknya koin bermata dua. Putusan yang diketok oleh MK itu dinilai punya dampak positif dan negatif.

Dewan Pembina PSHK UII, Despan Heryansyah, menilai putusan MK tersebut bisa dimaknai sebagai nutrisi baru untuk peradaban demokrasi. Sebab selama ini kalau ada partai kecil yang dapat suara 3 persen malah tidak bisa masuk ke Senayan.

“Bagaimanapun 3 persen itu adalah suara rakyat, yang jika tidak dihitung, rakyatlah yang dirugikan karena suaranya menjadi tidak terwakili di DPR,” kata Despan, Jumat, 1 Maret 2024.

Despan mengingatkan 3 persen tergolong angka yang besar dalam hajatan Pemilu 2024. Apalagi kalau ada banyak partai yang tidak mencapai 4 persen, maka jika dikonversi suaranya menjadi besar.

“Jadi dengan perubahan 4 persen ini perlindungan terhadap suara rakyat semakin terlindungi,” ujar Despan.

Walau demikian, Despan meminta penentuan ambang batas di pemilu berikutnya harus hati-hati sekaligus dibarengi kebijakan strategis. Despan mengkhawatirkan terlalu banyaknya parpol yang mengikuti Pemilu.

Kalau jumlah parpol terlalu banyak, Despan menduga pemerintah bakal terkendala dalam meraih dukungan parlemen guna menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

“Implikasinya adalah terhadap jalannya

pemerintahan menjadi terganggu karena sulitnya mendapatkan dukungan parlemen. Ini juga masalah serius yang tidak bisa di lupakan begitu saja,” ujar Despan.

Koordinator Komite Pemilihan Indonesia, Jeirry Sumampow, mengungkap celah yang bisa dimanfaatkan untuk mengakali putusan MK yang menghapus ambang batas parlemen 4 persen. Sehingga, Jeirry menganggap putusan MK itu ‘kentang’ alias kena tanggung.

Jeirry sebenarnya berharap MK mengambil sikap tegas saja dengan menghapus ambang batas parlemen sepenuhnya. “Sayangnya pencabutan ambang batas itu tidak disertai dengan ketegasan tentang berapa angka ambang batas yang pas,” kata Jeirry.

Jeirry mengamati putusan MK justru malah terkesan punya kelemahan. Sebab, MK masih menyerahkan penentuan ambang batas parlemen kepada pembentuk undang-undang yakni DPR dan pemerintah pusat.

“Inilah kelemahan putusan MK ini. Tidak tuntas jadinya,” ujar Jeirry.

Jeirry menyayangkan MK malah masih memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengatur ambang batas parlemen dalam perubahan UU Pemilu nantinya. Menurutnya, MK lebih baik mencabut ambang batas parlemen sepenuhnya.

“Sebab bisa saja nanti DPR akan menentukan ambang batas parlemen itu tetap ada dan bisa juga angkanya dibuat 3,5 persen. Jika begitu, maka tetap saja akan menghalangi kedaulatan rakyat,” ujar Jeirry.

Jeirry juga menekankan sebaiknya ambang batas parlemen untuk DPR ditiadakan saja. Adapun soal penyederhanaan partai di parlemen cukup dilakukan lewat pengetatan seleksi partai politik yang ikut pemilu.

“Sehingga jika partai sudah lolos sebagai peserta pemilu, maka sudah dianggap layak untuk masuk parlemen,” ujar Jeirry. ●RDO

persen. PasaInya, Partai Nasdem melihat bahwa saat ini banyak partai politik baru yang terbentuk, tetapi tak memiliki ideologi. Karenanya,



“Pengelembungan suara, jika memang terjadi, modusnya tidak harus mengambil dari parpol lain, tetapi bisa dari kertas suara yang tidak terpakai”

Dedi Kurnia Syah



SUARA PSI MELAMBUNG PPP SIAP-SIAP DIGULUNG

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendapatkan ledakan jumlah suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dalam beberapa waktu belakangan. PSI hanya membutuhkan beberapa hari untuk bisa menembus perolehan suara sebesar 3 persen.

Berdasarkan hasil real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pileg 2024, Senin, 4 Maret 2024 pukul 13.00 WIB, menunjukkan ada trend kenaikan perolehan suara PSI. Sebelumnya, Jumat, 1 Maret 2024, partai pimpinan Kaesang Pangarep yang juga putra bungsu Presiden Jokowi mendapatkan perolehan suara sebesar 3,01 persen.

Kini, perolehan suara PSI sebesar 3,13 persen. Artinya ada kenaikan sebesar 0,12 persen sejak 4 hari belakangan ini.

Setidaknya, PSI membutuhkan sebanyak 0,87 persen untuk bisa lolos ke Senayan atau memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Perolehan ini berdasarkan 65,85 persen suara yang sudah masuk ke Sirekap atau sekitar 542.065 dari total 823.236 TPS.

Kenaikan tak cuma dialami PSI, namun juga Partai Gelora yang sama-sama berada di gerbong pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Jika PSI sudah meraih 3,13 persen, Partai Gelora kini sudah mengumpulkan 1,49 persen suara.

Menlonjaknya suara PSI ini menjadi sorotan karena sebelumnya partai yang dipimpin Kaesang Pangarep ini diprediksi lewat hasil quick count sejumlah lembaga survei tidak lolos ambang batas parlemen dengan suara sekitar 2-2,5 persen. Namun kini, perolehan data dari real count KPU berkata sebaliknya. Posisi PSI ini mengancam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini memperoleh 4,01 persen.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy, menduga, meroketnya suara PSI terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM). Sebab, terjadi indikasi adanya penggeseran suara tidak sah menjadi sah untuk PSI.

“Hal ini jelas merugikan perolehan seluruh partai politik peserta Pemilu,” kata Romy, Senin, 4 Maret 2024.

Romy membeberkan, kalau partisipasi pemilih diasumsikan sama dengan 2019, maka suara sah tiap TPS adalah 81,69 persen dikali 300 suara sama dengan 245 suara per TPS. Itu berarti persentase suara PSI

adalah 173 dibagi 245 yang hasilnya 71 persen, dan seluruh partai lain hanya 29 persen.

“Sebuah angka yang sangat tidak masuk akal mengingat PSI sebagai partai baru yang tanpa infrastruktur mengakar dan kebanyakan caleg RI-nya saya monitor minim sosialisasi ke pemilih,” ungkap Romy.

Untuk menyelidiki dugaan itu, Romy mendorong partainya membawa hal terkait sebagai materi hak angket. Pihaknya akan mendesak pemanggilan seluruh aparat negara yang terlibat, mulai dari KPPS, PPS, PPK, KPUD dan KPU serta Bawaslu dan seluruh perangkatnya untuk mengungkap dugaan tersebut.

“Secara politik, DPR akan melakukan percepatan dan terobosan melalui hak angket agar tindakan-tindakan kecurangan Pemilu semacam ini dihentikan!” minta Romy.

Romy mengaku mendapatkan informasi bahwa ada upaya dari penyelenggara Pemilu untuk mengelembungkan suara PSI di tingkat kabupaten/kota yang bisa mencapai 50 ribu suara di tiap masing-masing daerah.

“Dengan menarget kepada penyelenggara pemilu daerah agar PSI memperoleh 50 ribu suara di tiap kabupaten/kota di Jawa, dan 20 ribu suara di tiap kabupaten/kota di luar Jawa,” katanya.

Selain itu, Romy mengendus pengelembungan suara ini juga bantuan dari aparat. “Pengelembungan suara PSI ini diduga terjadi begitu Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM),” katanya.

Romy juga mengungkapkan cara PSI untuk bisa mengelembungkan suaranya. PSI membiayai organisasi masyarakat kepemudaan yang dipimpin salah menteri dari kabinet Presiden Jokowi untuk melakukan operasi di TPS pada saat hari pencoblosan.

“Setidaknya itu yang saya dengar dari salah-satu aktivisnya yang diberikan pembiayaan langsung oleh aparat

sebelum Pemilu 2024,” ujarnya.

Romy juga mendapatkan informasi dari kader yang ada di daerah terkait pengelembungan suara

memiliki PSI, salah satunya terjadi di Bandung. “Laporan kader PPP di Kabupaten Bandung, Kecamatan Banjaran, Desa Banjaran Wetan di TPS 024. Suara PSI digelembungkan 2.100 persen dari 1 suara menjadi 21 suara,” imbuhnya.

“Dan masih banyak lagi laporan-laporan serupa yang disampaikan kepada Pusat Tabulasi Nasional DPP PPP yang menurut laporan sementara pengelembungan suara PSI ini diduga terjadi begitu terstruktur, sistematis, dan massif,” tambahnya.

Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, menampik segala dugaan kecurangan di balik lonjakan suara partainya. Dia menilai wajar adanya penambahan suara saat KPU melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

“Yang tidak wajar adalah apabila ada pihak-pihak yang mencoba menggiring opini dengan mempertanyakan hal tersebut,” kata Grace.

Ia menambahkan, saat ini masih lebih dari 70 juta suara belum dihitung dan sebagian besar berada di basis-basis pendukung Jokowi. “Di mana PSI mempunyai potensi dukungan yang kuat,” kata dia.

Grace mengingatkan perbedaan antara hasil hitung cepat atau quick count dengan real count KPU juga terjadi pada partai-partai lain.

Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menyatakan, kenaikan suara PSI sangat anomali dibandingkan dengan partai lainnya.

“Secara logika politik, kalo data sudah masuk di atas 60 persen naik turunnya perolehan suara partai atau caleg biasanya datar, tak ada lonjakan-lonjakan yang signifikan. Ini yang perlu diinvestigasi untuk mengetahui datanya secara akurat agar semua transparan,” ucapnya.

Namun, ia menduga data PSI naik signifikan itu bisa juga karena suara yang diinput berasal dari basis-basis PSI seperti di Jakarta, sebagian Jawa Timur, dan Jawa Tengah pada Pemilu 2024.

“Tapi di luar itu basis PSI lemah dan di real count KPU potensial stagnan atau menurun”

prosentasenya. Karenanya jangan juga buru-buru menghakimi,” ujarnya.

Adi menegaskan, real count KPU versi situs Sirekap ini bukan hasil resmi perolehan suara. “Yang resmi tetaplah hitung manual yang saat ini penghitungannya masih berjenjang dilakukan KPU dari TPS, kecamatan, dan seterusnya. Karenanya publik harus mengawal hasil manual ini,” kata dia.

Adi mengungkap adanya tiga faktor yang menyebabkan lonjakan suara PSI menjadi sorotan publik. “Pertama faktor Ketum PSI yang anak presiden. Seakan PSI punya privilege dalam politik. Padahal belum tentu juga, karena PSI pun butuh kerja keras. Di negara ini segala sesuatu yang terkait penguasa dan kekuasaan selalu dicurigai,” ungkap Adi.

Faktor kedua adalah quick count sejumlah lembaga survei yang memprediksi PSI tak lolos ke parlemen. Jadi, ketika ada suara PSI naik signifikan seakan-akan itu anomali, mencurigakan, dan PSI potensial lolos ke parlemen.

“Padahal semestinya biasa saja. Karena data real count berbasis sirekap bukan hasil resmi pemilu,” katanya.

Faktor ketiga terkait dengan pernyataan Tim Sukes Ganjar-Mahfud, Andi Widjajanto. “Yang bilang bahwa Jokowi pernah berkata pada dirinya: pertama paslon 2 menang satu putaran. Kedua, suara PDIP turun. Ketiga PSI lolos parlemen. Dua Presidksi Andi itu sah, tinggal tunggu apakah PSI lolos parlemen atau tidak. Inilah yang menjadi bahan pembicaraan ramai,” ujar Adi.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai, jika membaca durasi penambahan suara PSI yang drastis memang patut dicurigai. Karena sistem penghitungan KPU mengalami masalah sejak awal dan publik seharusnya tidak memiliki kewajiban untuk percaya.

“Sehingga hasil yang diterima PSI juga potensial karena faktor kesalahan, atau bahkan pelanggaran semisal penambahan secara tidak normal,” katanya.

“Situasi pengelembungan itu memungkinkan, mengingat dari semua materi quick count yang dilaksanakan oleh banyak lembaga survei, dan terbukti selalu akurat bahkan sejak Pemilu 2004, kini tidak akurat dan hanya pada PSI, tentu ini menggelikan,” ungkapnya.

Pengelembungan suara, sambungnya, jika memang terjadi, modusnya tidak harus mengambil dari parpol lain, tetapi bisa dari kertas suara yang tidak terpakai. “Dan, pengelembungan suara antar-Parpol, bukan antar-caleg, ini hanya bisa dilakukan oleh pihak yang benar-benar berkuasa dan bisa mengendalikan,” imbuh Dedi.

Dengan situasi saat ini, menurutnya terlalu berisiko jika PSI lolos ke parlemen dengan cara tidak lazim. “Bisa saja gerakan masyarakat tidak hanya menuntut audit atas perolehan suara PSI, tapi justru melebar hingga ke Pilpres. Jangan sampai gara-gara PSI, maka rusak semua hasil KPU selama ini,” pungkasnya. ●RDO